



PEMERINTAH
PROVINSI JAMBI

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2021 - 2026



Dr. H. AL HARIS, S.Sos., M.H.
GUBERNUR JAMBI

Drs. H. ABDULLAH SANI, M.Pd.I
WAKIL GUBERNUR JAMBI

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah Subhanahuwata'ala, bahwa penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Jambi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Renstra Sekretariat Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi untuk Periode 2021–2026 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sekretariat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah yang berada di Provinsi Jambi dipandang perlu menyusun Renstra dengan memperhatikan berbagai kondisi, baik secara internal maupun eksternal dan tuntutan profesionalisme pelayanan pemerintah yang cepat, tepat, efektif dan efisien sebagai prasyarat dalam membangun pemerintahan yang bersih dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good govermance and clean government*)

Dengan tersusunnya Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jambi ini, tidak terlepas dari berbagai kekurangan, keterbatasan kemampuan, pengetahuan, pola pikir dan waktu, maka kami mengharapkan sumbang saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak dalam penyempurnaannya.

Jambi, Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAMBI,

H. SUDIRMAN,SH.,MH
Pembina Utama
NIP. 19680109 199203 1 002

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan..... | 4 |
| 1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra Dalam Perencanaan Daerah | 5 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 5 |
| | |
| BAB II GAMBAR PELAYANAN SEKRETARIAT PROVINSI JAMBI | 10 |
| 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi | 10 |
| 2.2 Sumber Daya Sekretariat Hukum | 15 |
| 2.3 Pengelolaan Barang Milik Daerah..... | 18 |
| 2.4 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah | 20 |
| 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah | 33 |
| 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah | 34 |
| | |
| BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI | 37 |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah | 37 |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 43 |
| 3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis | 46 |
| 3.4 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga..... | 48 |
| 3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 48 |
| 3.6 Pencermatan Lingkungan Strategis | 49 |

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH ... 51

4.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat 51

4.2 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah 62

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 67

5.1 Strategi Pembangunan 67

5.2 Arah Kebijakan 73

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN 77**

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 106

BAB VIII PENUTUP 110

DAFTAR TABEL

| No. Tabel | Judul Tabel | Halaman |
|------------------|---|----------------|
| Tabel 2.1 | Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Berdasarkan Jenis Kelamin Periode 2021 | 15 |
| Tabel 2.2 | Data PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah Berdasarkan Unit Kerja Periode 2021 | 16 |
| Tabel 2.3 | Profil Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan Ruang Gaji Periode 2021 | 17 |
| Tabel 2.4 | Profil Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan Periode 2021 | 17 |
| Tabel 2.5 | Inventaris Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Periode 2020 | 19 |
| Tabel 2.6 | Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2020 | 21 |
| Tabel 2.7 | Rekapitulasi Anggaran Realisasi Pendanaan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi tahun 2016-2020..... | 35 |
| Tabel 4.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah | 53 |
| Tabel 4.2 | Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah | 62 |
| Tabel 5.1 | Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan strategi Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 | 68 |
| Tabel 7.1 | Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Jambi | 79 |
| Tabel 3.2 | Populasi dan Sampel | 42 |
| Tabel 3.3 | Operasional Variabel | 46 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional maupun regional, perlu disusun suatu perencanaan strategis yaitu berupa proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada, maka Sekretariat Daerah Provinsi Jambi menyusun dokumen perencanaan lima tahun, yaitu Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk menjamin konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai upaya pencapaian indikator kinerja pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahunan dituangkan dalam strategi pembangunan daerah berupa kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disertai dengan perencanaan penganggaran sebagai upaya pencapaian visi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 yaitu “JAMBI YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA”.

Keterkaitan antara Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi sebagai upaya pencapaian sasaran pembangunan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016.
Nomor 114, mengatur tentang Perangkat Daerah (PD).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat daerah Provinsi Dan Kabupaten Kota;
18. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005- 2025;

20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026
22. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh aparatur pada Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan, sasaran, strategi arah kebijakan rencana program, kegiatan dan anggaran serta indikator kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026 adalah :

- 1) Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan/atau Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi;
- 2) Sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan penganggaran Sekretariat Daerah Provinsi Jambi;
- 3) Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra dalam Perencanaan Daerah

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya pasal 19 ayat (3), menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 3 (tiga) bulan setelah pelantikan, yang selanjutnya digunakan sebagai Pedoman Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah maupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang disampaikan kepada Presiden.

Renstra Sekretariat Daerah bersama Renstra Perangkat Daerah lainnya merupakan bagian yang utuh RPJMD Provinsi Jambi. Renstra Setda mengandung tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga Renstra ini berperan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dalam pencapaian kinerja Sekretariat Daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jambi disusun mengacu kepada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan susunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah (PD), fungsi Renstra Perangkat Daerah (PD) dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah (PD), Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/ Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah (PD)

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kewenangan Perangkat Daerah (PD), serta Pedoman dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah (PD).

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra.

1.4 Kedudukan dan Peranan RENSTRA dalam Perencanaan Daerah

Mengemukakan secara ringkas keterkaitan peranan Renstra Perangkat Daerah (PD) dalam dokumen perencanaan Pembangunan daerah lainnya

1.5 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah (PD), serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Sekretariat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Sekretariat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah (PD), struktur organisasi Perangkat Daerah (PD), serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Perangkat Daerah (PD). Uraian tentang struktur organisasi, jumlah personil dan tata laksana Perangkat Daerah (PD) (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah.

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Sekretariat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Sekretariat Daerah periode sebelumnya, indikator pelayanan Sekretariat Daerah atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Anggaran Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah

Bagian ini menyajikan informasi anggaran, belanja dan pembiayaan basis kas untuk periode tertentu.

2.5 Tantangan Pelayanan Sekretariat Daerah

Memuat hal-hal berpotensi menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang terkait visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Sekretariat Daerah.

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Pada Bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Sekretariat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan.

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAMBI**

4.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah berdasarkan hasil telaahan dan fungsi Sekretariat Daerah dalam pencapaian visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

4.2 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah

Pada bagian ini memuat tentang Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Penjelasan dan Penanggung Jawab pelaksanaan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

**BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI JAMBI**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan Strategi dan Kebijakan jangka Menengah Sekretaris Daerah

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN INDIKATIF**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode 2021 sd 2026.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI

2.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi. Selanjutnya, untuk mengatur pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

Kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Staf Ahli Gubernur Jambi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan, Evaluasi dan Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya;

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi, terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah Provinsi;**
- b. Asisten I (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) membawahi dan mengkoordinasikan:**

- 1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah**

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi Daerah dan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2. Biro Kesejahteraan Rakyat**

Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Biro Hukum

Biro Hukum mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan Provinsi, peraturan perundang-undangan Kabupaten/Kota, bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Asisten II (Asisten Perekonomian dan Pembangunan) membawahi dan mengkoordinasikan:

1. Biro Perekonomian

Biro Perekonomian mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, penanaman modal, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Biro Administrasi Pembangunan

Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas

membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Asisten III (Asisten Administrasi Umum) membawahi dan mengkoordinasikan:

1. Biro Organisasi

Biro Organisasi mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Biro Umum

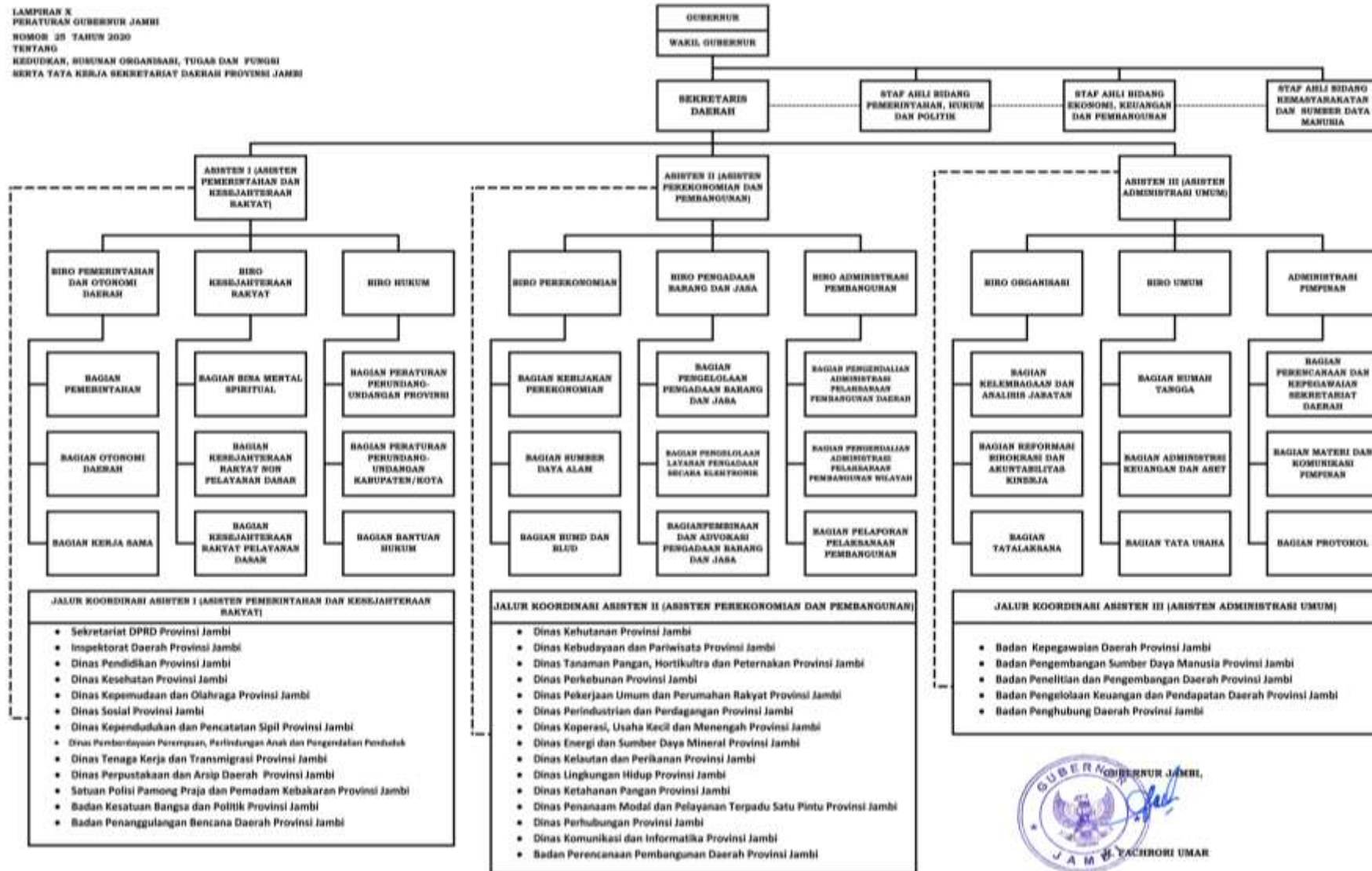
Biro Umum mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Biro Administrasi Pimpinan

Biro Administrasi Pimpinan mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Bagan 2.1
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi*

LAMPIRAN 5
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG
KEHUKUM, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI



2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah

Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan peran Sekretariat Daerah, yaitu keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, sebagai penentu keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan peran Sekretariat Daerah dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Dengan SDM yang berpendidikan tinggi, Sekretariat Daerah diharapkan dapat melaksanakan tugas- tugas lembaga dan unit kerja secara lebih baik.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas, Sekretariat Daerah Provinsi Jambi memiliki pegawai sebanyak 447 orang.

Tabel. 2.1
Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah
Berdasarkan Jenis Kelamin
Periode 2021

| No | Jenis Kelamin | Jumlah Pegawai | Keterangan |
|--------|---------------|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Laki-Laki | 258 | |
| 2 | Perempuan | 189 | |
| Jumlah | | 447 | |

Tabel. 2.2

Data PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah

Berdasarkan Unit Kerja

Periode 2021

| No | Nama Unit Kerja | Eselon | | | | | Jafu ng | Pelak sana | Total |
|--------|---|--------|------|------|-------|------|------------|---------------|-------|
| | | I.b | II.a | II.b | III.a | IV.a | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Sekretaris Daerah | 1 | | | | | | | 1 |
| 2 | Staf Ahli: | | | | | | | | |
| | - Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik | | 1 | | | | | | 1 |
| | - Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan | | 1 | | | | | | 1 |
| | - Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia | | 1 | | | | | | 1 |
| 3 | Asisten Pemerin- tahan dan Kesejah- teraan Rakyat | | | | | | | | |
| | a. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah | | 1 | 1 | 3 | 9 | | 15 | 28 |
| | b. Biro Kesejahteraan Rakyat | | 1 | | 3 | 9 | | 44 | 56 |
| | c. Biro Hukum | | 1 | 1 | 3 | 9 | | 18 | 31 |
| 4 | Asisten Perekonomian dan Pembangunan | | | | | 9 | | | |
| | a. Biro Perekonomian | | | 1 | 3 | 9 | | 19 | |
| | b. Biro Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 3 | 9 | 14 | 21 | 47 |
| | c. Biro Administrasi Pembangunan | | | 1 | 3 | 9 | | 29 | 42 |
| 5 | Asisten Administrasi Umum | | | | | | | | |
| | a. Biro Organisasi | | | 1 | 3 | 9 | 1 | 21 | 35 |
| | b. Biro Umum | | | | 3 | 9 | | 100 | |
| | c. Biro Administrasi Pimpinan | | | 1 | 3 | 9 | 8 | 36 | 64 |
| Jumlah | | 1 | 6 | 6 | 27 | 81 | 23 | 303 | 447 |

Tabel. 2.3
Profil Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah
Berdasarkan Golongan Ruang Gaji
Periode 2021

| No | Unit Kerja | Golongan Tingkat Gaji | Jumlah Pegawai | Ketera ngan |
|--------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Pembina Utama | IV/e | - | |
| 2 | Pembina Utama Madya | IV/d | 2 | |
| 3 | Pembina Utama Muda | IV/c | 11 | |
| 4 | Pembina Tingkat I | IV/b | 19 | |
| 5 | Pembina | IV/a | 25 | |
| 6 | Penata Tingkat I | III/d | 111 | |
| 7 | Penata | III/c | 108 | |
| 8 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 77 | |
| 9 | Penata Muda | III/a | 33 | |
| 10 | Pengatur Tingkat I | II/d | 28 | |
| 11 | Pengatur | II/c | 20 | |
| 12 | Pengatur Muda Tingkat I | II/b | 9 | |
| 13 | Pengatur Muda | II/a | 4 | |
| 14 | Juru Tingkat I | I/d | | |
| 15 | Juru | I/c | | |
| 16 | Juru Muda Tingkat I | I/b | | |
| 17 | Juru Muda | I/a | | |
| Jumlah | | | 447 | |

Tabel. 2.4
Profil Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah
Berdasarkan Pendidikan
Periode 2021

| No | Pendidikan | Jumlah Pegawai | Keterangan |
|--------|---|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | STRATA 3 (S-3) | 1 | |
| 2 | STRATA 2 (S-2) | 78 | |
| 3 | STRATA 2 (S-1) | 254 | |
| 4 | DIPLOMA 4 (D-4) | - | |
| 5 | DIPLOMA 3 (D-3) | 12 | |
| 6 | DIPLOMA 2 (D-2) | - | |
| 7 | Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) | 94 | |
| 8 | Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) | 4 | |
| 9 | Sekolah Dasar (SD) | 4 | |
| Jumlah | | 447 | |

2.3 Pengelolaan Barang Milik Daerah

Salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah adalah kewenangan di bidang pengelolaan barang milik daerah dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari subsistem pengelolaan keuangan daerah. Dari konteks pengertian barang milik daerah itu sendiri dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menegaskan bahwa “barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah”.

Penetapan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tabel. 2.5
Inventarisasi Barang Milik Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Jambi
Periode 2020

| PEMERINTAH PROVINSI JAMBI | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|----------|--------------------|
| REKAPITULASI BARANG MILIK DAERAH | | | | | |
| Per 31 Desember 2020 | | | | | |
| BIRO PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | | | |
| No. Urut | Kode Golongan | Kode Bidang barang | Nama Bidang Barang | Barang | Nilai (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 01 | 01 | TANAH | 467,00 | 660.111.382.662,47 |
| | | | TANAH | 467,00 | 660.111.382.662,47 |
| 2 | 02 | | PERALATAN DAN MESIN | 1.498,00 | 6.901.490.677,70 |
| | | 02 | Alat-alat Besar | | |
| | | 03 | Alat-alat Angkutan | 4 | 201.347.238,70 |
| | | 04 | Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur | | |
| | | 05 | Alat-alat Pertanian / Peternakan | | |
| | | 06 | Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | 1.443,00 | 5.661.620.130,00 |
| | | 07 | Alat-alat Studio, Komunikasi dan | 48 | 1.034.623.309,00 |
| | | 08 | Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan | 3 | 3.900.000,00 |
| | | 09 | Alat-alat Laboratorium | | |
| | | 10 | Alat-alat Persenjataan | | |
| | | 11 | Komputer | | |
| | | 12 | Alat Eksplorasi | | |
| | | 13 | Alat Pengeboran | | |
| | | 14 | Alat Produksi Pengolahan dan | | |
| | | 15 | Alat Bantu Eksplorasi | | |
| | | 16 | Alat Keselamatan Kerja | | |
| | | 17 | Alat Peraga | | |
| | | 18 | Peralatan Proses/Produksi | | |
| | | 19 | Rambu-Rambu | | |
| | | 20 | Peralatan Olahraga | | |
| 3 | 03 | | GEDUNG DAN BANGUNAN | 211,00 | 74.115.660.160,66 |
| | | 21 | Bangunan Gedung | 211 | 74.115.660.160,66 |
| | | 22 | Monumen | | |
| 4 | 04 | | JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN | 9,00 | 373.788.800,00 |
| | | 23 | Jalan dan Jembatan | | |
| | | 24 | Bangunan Air / Irigasi | 6 | 55.416.000,00 |
| | | 25 | Instalasi | 3 | 318.372.800,00 |
| | | 26 | Jaringan | | |
| 5 | 05 | | ASET TETAP LAINNYA | 6,00 | 20.115.228.301,00 |
| | | 27 | Bahan Perpustakaan | | |
| | | 28 | Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan | | |
| | | 29 | Hewan | | |
| | | 30 | Renovasi | 6 | 20.115.228.301,00 |
| 6 | 06 | | KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan | - | 444.695.585,00 |
| | | 31 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | - | 444.695.585,00 |
| 7 | 07 | | ASET LAINNYA | 1.320,00 | 4.648.908.627,02 |
| | | 32 | Soft Ware (Aset Tidak Berwujud) | 3 | 203.071.250,00 |
| | | 33 | Hewan Ternak Bergulir | | |
| | | 34 | Aset Pengalihan Pihak Lain | | |
| | | 35 | Aset Rusak Berat | 1.317 | 4.445.837.377,02 |
| | | 36 | Kerjasama dengan pihak ke III | | |
| | | 37 | SID Perluasan & Cetak Sawah | | |
| | | 38 | Piutang | | |
| | | 39 | TPTGR | | |
| | | 40 | SKPKD | | |
| | | 41 | Reklamasi Jaminan Timbang | | |
| | | 42 | Koreksi BPK/ Kurang Pencatatan | | |
| J U M L A H | | | | 3.511,00 | 766.711.154.813,85 |

2.4 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Hasil evaluasi kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi periode jangka menengah Renstra Tahun 2016-2020 dapat diketahui bahwa capaian kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra tahun 2016-2020 menurut Indikator Kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2020

1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

| No. | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Kondisi Awal | Target Tahun ke- | | | | | Realisasi Tahun ke- | | | | |
|-----|--|--|--|----------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | (2016) | (2017) | (2018) | (2019) | (2020) | (2016) | (2017) | (2018) | (2019) | (2020) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum, dan otonomi daerah | Meningkatnya Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi | Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi > 2,50 | 2,322 | 2,325 | 2,360 | 2,395 | 2,43 | 2,465 | 2,434 | 2,636 | 2,838 | 1,702 | 2,849 |
| | | | Persentase Nilai LPPD kab/kota se-Provinsi Jambi > 2,300 | 63.6% | 63,60 | 72,70 | 81,81 | 90 | 100 | 63 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Menurunnya sengketa batas wilayah administrasi | Persentase penyelesaian batas antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Tetangga | 40% | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 40 | 60 | 80 | 80 | 80 |
| | | | Persentase penyelesaian batas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. | 6% | 6 | 17,6 | 29,4 | 47 | 58,8 | 47 | 53 | 53 | 70,5 | 70,5 |

2. Biro Kesejahteraan Rakyat

| No. | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Kondisi Awal | Target Tahun ke- | | | | | Realisasi Tahun ke- | | | | |
|-----|--|---|---|----------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | (2016) | (2017) | (2018) | (2019) | (2020) | (2016) | (2017) | (2018) | (2019) | (2020) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Terwujudnya dukungan penyelenggaraan kehidupan umat beragama, sosial, dan kemasyarakatan | Meningkatnya pelayanan haji dan kerukunan umat beragama | Persentase rekomendasi kehidupan umat beragama yang diterima gubernur | 80% | 82% | 86% | 90% | 92% | 93% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | Meningkatnya peran lembaga/ organisasi bidang sosial, kemasyarakatan, transmigrasi dan ketenagakerjaan | Persentase rekomendasi bidang Sosial Kemasyarakatan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang diterima gubernur | 86% | - | - | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | Meningkatnya peran lembaga/ organisasi Bidang Pendidikan, kepemudaan, olahraga, kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana | Persentase rekomendasi Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Kepemudaan yang diterima gubernur | 85 % | - | - | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

3. Biro Hukum

| No. | Indikator Kinerja | Target | Target Renstra | | | | | Realisasi Capaian | | | | | Rasio Capaian | | | | |
|-----|--|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | (2016) | (2017) | (2018) | (2019) | (2020) | (2016) | (2017) | (2018) | (2019) | (2020) | (2016) | (2017) | (2018) | (2019) | (2020) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Persentase Produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83% | 83% | 83% | 100% | 100% | 80 | 80 | 83 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase Produk hukum daerah kabupaten/kota yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 140% | 159% | 155% | 183% | 200% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Persentase produk hukum daerah yang bisa diakses publik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 103% | 92% | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 |
| 4 | Persentase permasalahan hukum yang difasilitasi | 100% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 71% | 70% | 70% | 91% | 100% | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |

4. Biro Perekonomian

| No. | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Kondisi Awal | Target Tahun ke- | | | | | Realisasi Tahun ke- | | | | |
|-----|--|--|--|----------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------|--------|---------|--------|--------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | (2016) | (2017) | (2018) | (2019) | (2020) | (2016) | (2017) | (2018) | (2019) | (2020) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pengembangan Kebudayaan, | Meningkat-nya Pelayanan Administrasi Perkantoran menjadi Lebih baik | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (realisasi seluruh kegiatan/ 100%) X 100% | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | | | 100 % | 99% | 97% | | |
| 2 | Kepariwisata dan Koperindag serta Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam secara terpadu yang berwawasan lingkungan dan optimalisasi | Terlaksana dan Tersedianya buku laporan rencana strategis, rencana kerja, lkjip, lppd, rka, dpa dan capaian kinerja dan keuangan lainnya | Nilai SAKIP | ≤B | ≤B | ≤B | ≤B | | | B | B | B | | |
| 3 | pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung BUMD yang handal, kontribusi BUMN, peningkatan pendapatan daerah, pengendalian inflasi, | Terwujudnya Pembinaan dan Terasilitasinya Pembangunan Ekonomi di Bidang Penanaman Modal, BUMN/BUMD dan Pendapatan Keuangan di Provinsi Jambi | Persentase kabupaten/kota Kota yang dibina bidang penanaman modal, BUMN/BUMD dan pendapatan keuangan | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | | | 91% | 98% | 97% | | |
| 4 | dan investasi yang kondusif yang tertata dan terkelola secara baik sebagai bahan kebijakan Pemerintah Daerah | Tersedianya data dari Pelaksanaan Program Pembinaan Pembangunan Ekonomi di Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Koperindag | Persentase Kabupaten/Kota yang di bina bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif dan koperindag yang menjadi kebijakan | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | | | 91% | 99% | 99,9 5% | | |
| 5 | | Terbina dan Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Pembangunan Ekonomi di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Persentase Kabupaten/Kota yang di Bina Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | | | 83% | 98% | 95,3 8% | | |

Renstra Setda Provinsi Jambi
Tahun 2021-2026

| No. | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Kondisi Awal | Target Tahun ke- | | | | | Realisasi Tahun ke- | | | | |
|-----|--------|---|--|----------------------|------------------|--------|--------|-------------|-------------|---------------------|--------|--------|---------|---------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | (2016) | (2017) | (2018) | (2019) | (2020) | (2016) | (2017) | (2018) | (2019) | (2020) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 6 | | Terbina dan Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Pembangunan Ekonomi di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan | Persentase Kabupaten/Kota yang di Bina Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | | | 92% | 99% | 97% | | |
| 7 | | Peningkatan nilai tambah sektor Ekonomi dan SDA pada Struktur Ekonomi Daerah | - Persentase Sektor Ekonomi pada Pertumbuhan Ekonomi | | | | | 4,80 % | 4,80 % | | | | 4,40 % | 0,79 % |
| | | | - Skor IKM Biro Perekonomian dan SDA | | | | | 80.0 0 | 80.0 0 | | | | 78,6 25 | 78,6 25 |
| | | | - Persentase Peningkatan Investasi | | | | | 3% | 3% | | | | 4% | 2% |
| | | | - Stabilisasi Angka Inflasi | | | | | 3,0 – 3,5 % | 3,0 – 3,5 % | | | | 2,98 % | 0,71 % |

5. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

| No. | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Kondisi Awal | Target Tahun ke- | | | | | Realisasi Tahun ke- | | | | |
|-----|---|--|--|----------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | (2016) | (2017) | (2018) | (2019) | (2020) | (2016) | (2017) | (2018) | (2019) | (2020) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Merumuskan kebijakan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan | | Proses penatausahaan barang milik daerah aset | 70% | 85% | 90% | 95% | 100 % | 70% | 85% | 90% | 95% | 100 % | 100 % |
| | | Meningkatkan kinerja penge-lolaan barang milik daerah bagi aparatur sipil negara lingkup Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota | Prosentase yang di Fasilitas, bimbingan teknis, sosialisasi kepada organisasi perangkat daerah | 75% | 85% | 90% | 95% | 100 % | 100 % | 80% | 95% | 95% | 99% | 100 % |
| | | Terpenuhi sarana dan prasarana aparatur dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi serta unsur pimpinan | Prosentase Pengadaan kendaraan dinas/opersional dan perlengkapan gedung kantor setda Provinsi Jambi dan pimpinan | 80% | 85% | 90% | 95% | 100 % | 90% | 90% | 95% | 98% | 99% | 90% |
| | | Meningkatkan Penatatausahaa, Pengadaan dan Pemanfaatan kekayaan daerah | Prosentase data yang inventarisasi, pembinaan, pemafaatan pengamanan barang milik daerah | 85% | 85% | 90% | 95% | 90% | 95% | 90% | 90% | 98% | 99% | 100 % |

6. Biro Administrasi Pembangunan

| No. | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Kondisi Awal | Target Tahun ke- | | | | | Realisasi Tahun ke- | | | | |
|-----|--|--|---|----------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | (2016) | (2017) | (2018) | (2019) | (2020) | (2016) | (2017) | (2018) | (2019) | (2020) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Meningkatkan Persentase SKPD yang melaksanakan program prioritas sesuai dengan rencana | Meningkatnya Persentase SKPD yang melaksanakan program prioritas sesuai dengan rencana | Persentase Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2 | Meningkatkan pengendalian pelaksanaan bidang pekerjaan umum dan perhubungan serta meningkatnya aksesibilitas dan kualitas insfrastruktur umum. | Meningkatnya pengendalian pelaksanaan bidang pekerjaan umum dan perhubungan serta meningkatnya aksesibilitas dan kualitas insfrastruktur umum. | Persentase aksesibilitas dan kualitas infrastruktur daerah serta terlaksananya PBJ sesuai ketentuan | 98% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

7. Biro Organisasi

| No. | Indikator Kinerja | Target | Target Renstra | | | | | Realisasi Capaian | | | | | Rasio Capaian | | | | |
|-----|---|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | (2016) | (2017) | (2018) | (2019) | (2020) | (2016) | (2017) | (2018) | (2019) | (2020) | (2016) | (2017) | (2018) | (2019) | (2020) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jambi tepat ukuran dan tepat fungsi | 96% | 61% | 70% | 78% | 87% | 96% | 61% | 70% | 78% | 87% | 96% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | IKM Provinsi Jambi | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Skor PMPRB Pemerintah Provinsi Jambi | 62,79 | 54,79 | 56,79 | 58,79 | 60,79 | 62,79 | 54,79 | 56,79 | 58,79 | 70 | 71,28 | 100 | 100 | 100 | 115 | 113 |
| 4 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi | BB | CC | CC | CC | B | BB | CC | CC | CC | CC | B | 100 | 100 | 100 | 85 | 83 |

8. Biro Umum

| No. | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Kondisi Awal | Target Tahun ke- | | | | | Realisasi Tahun ke- | | | | |
|-----|--------|---|---|----------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | (2016) | (2017) | (2018) | (2019) | (2020) | (2016) | (2017) | (2018) | (2019) | (2020) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas kinerja, dan keuangan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Biro Umum | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| | | | Opini atas laporan keuangan Sekretariat | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai |
| | | Meningkatnya Publikasi Konstruktif Kegiatan Kepala Daerah dan Program Pemprov Jambi | Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah | 100 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

9. Biro Administrasi Pimpinan / Humas Protokol

| No. | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Kondisi Awal | Target Tahun ke- | | | | | Realisasi Tahun ke- | | | | |
|-----|---|---|--|----------------------|------------------|--|--|--|--|--|-------------|-------------|--|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | (2016) | (2017) | (2018) | (2019) | (2020) | (2016) | (2017) | (2018) | (2019) | (2020) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Meningkatkan kapasitas pelayanan bidang kehumasan dan pelayanan informasi daerah dan Keprotokolan | Meningkatnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan | Persentase Sarana Prasarana Kantor Terpenuhi | Persentase | 60% | 60 | 70 | 70 | 90 | 90 | 60% | 60% | 60% | 60% |
| | | | Persentase pemenuhan komponen SAKIP | Persentase | NA | | | | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 100% |
| | | | Persentase pemenuhan kelengkapan administratif TLHP dipenuhi | Persentase | NA | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| | | | Rata-rata IKM pertriwulan | IKM | NA | | | | 80,03 | 80,03 | 5 | 14 | 7 | 80,03 |
| | | Meningkatnya Publikasi Konstruktif Kegiatan Kepala Daerah dan Program Pemprov Jambi | persentase informasi pembangunan Provinsi Jambi yang disiarkan di media Cetak | Persentase | 100 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | persentase informasi pembangunan Provinsi Jambi yang disiarkan di media on line | Persentase | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Meningkatnya Publikasi Konstruktif Kegiatan Kepala Daerah dan Program Pemprov Jambi | Persentase Peningkatan respon positif masyarakat melalui akun Pemerintah Provinsi Jambi (facebook dan instagram) | Persentase | NA | 100% (730 respon(instagram :400, facebook : 330)) | 100% (730 respon(instagram :400, facebook : 330)) | 100% (730 respon(instagram :400, facebook : 330)) | 100% (730 respon(instagram :400, facebook : 330)) | 100% (730 respon(instagram :400, facebook : 330)) | 800komentar | 800komentar | '- komentar: 238, '- like: 2004, '- kometar : 195, like : 20.511 | Facebook: 4.830 respon Instagram: 12.729 respon |
| | | | Persentase Informasi Pembangunan Provinsi Jambi | Persentase | 100 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Renstra Setda Provinsi Jambi
Tahun 2021-2026

| No. | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Kondisi Awal | Target Tahun ke- | | | | | Realisasi Tahun ke- | | | | |
|-----|--------|---|--|----------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | (2016) | (2017) | (2018) | (2019) | (2020) | (2016) | (2017) | (2018) | (2019) | (2020) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | yang disiarkan di Media Elektronik | | | | | | | | | | | |
| | | | Persentase penyebaran informasi pembangunan melalui bahan bacaan | Persentase | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Persentase Informasi Pembangunan Provinsi Jambi melalui Media Dalam dan Luar Ruang Terpasang | Persentase | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Meningkatnya Publikasi Konstruktif Kegiatan Kepala Daerah dan Program Pemprov Jambi | Persentase kabupaten kota yang menindaklanjuti rekomendasi Bakohumas Provinsi Jambi | Persentase | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Persentase kabupaten kota yang menindaklanjuti rekomendasi Bakohumas Provinsi Jambi | Persentase | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Persentase fasilitas diseminasi informasi internet sehat dan pembangunan daerah Provinsi Jambi | Persentase | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | IKM Layanan Dokumentasi | IKM | NA | | | 85 | 85 | 85 | | | 104.42 | 104.42 |
| | | Meningkatnya Pelayanan Keprotokolan / Kedinasan Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi | IKM Pelayanan Akomodasi dan Penerima Tamu | IKM | NA | | | 85 | 85 | 85 | | | 85 | 85 |
| | | | IKM Pelayanan Upacara dan Rapat- rapat | IKM | NA | | | 85 | 85 | 85 | | | 85 | 85 |

Renstra Setda Provinsi Jambi
Tahun 2021-2026

| No. | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Kondisi Awal | Target Tahun ke- | | | | | Realisasi Tahun ke- | | | | |
|-----|--------|-------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | (2016) | (2017) | (2018) | (2019) | (2020) | (2016) | (2017) | (2018) | (2019) | (2020) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | IKM Administrasi Keprotokolan | IKM | NA | | | 85 | 85 | 85 | | | 104.42 | 104.42 |

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah

Berdasarkan Capaian Kinerja Jangka Menengah Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi, ditemukan tantangan dalam pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kelembagaan secara proporsional dalam perumusan kebijakan umum meliputi pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial, perekonomian dan pembangunan serta administrasi;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas perumusan dan penyelenggaran kebijakan strategis program, kegiatan atau pekerjaan unggulan Daerah Provinsi;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis proses dan mekanisme kerja/prosedur dalam sistem manajemen pemerintahan;
4. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan kerjasama daerah dan luar negeri;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengendalian capaian kinerja kegiatan, sarana dan prasarana infrastruktur yang mumpuni untuk menopang pertumbuhan perekonomian, serta kebijakan pembiayaan pembangunan strategis;
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan akuntabel dan berkeadilan;
7. Mewujudkan kehidupan harmonis intern dan antar umat beragama
8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan Sumber Daya Manusia bidang Hukum.
9. Menata Produk hukum daerah;
10. Mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Daerah.

11. Adanya perubahan regulasi di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah maupun nasional.
12. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat
13. Penyampaian pelaporan, penyajian data dan informasi yang belum optimal dan akurat.
14. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi antar perangkat daerah / instansi dan lembaga terkait.
15. Meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi dan birokrasi.

2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah

Untuk anggaran melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Sekretariat Daerah Sumber Daya Keuangan pelaksanaan merupakan salah satu faktor yang menentukan disamping Sumber Daya Manusia dan Sarana dan Prasarana. Anggaran dan Realisasi pendanaan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Rekapitulasi Anggaran Realisasi Pendanaan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2016 – 2020

| No | Tahun | Uraian | Anggaran | Belanja Tidak Langsung | Belanja Langsung | | | Jumlah | SILPA | % | Keterangan |
|----|-------|-----------|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|------------------|-------------|------------|
| | | | | | Pegawai | Barang dan Jasa | Modal | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2016 | Anggaran | Rp 84,414,221,789 | | Rp 12,127,116,860 | Rp 70,347,016,329 | Rp 1,940,088,600 | | 0 | | |
| | | Realisasi | Rp 78,289,096,752 | | Rp 12,000,181,300 | Rp 59,973,394,606 | Rp 6,315,520,846 | | Rp 4,211,036,437 | 92.74396552 | |
| 2 | 2017 | Anggaran | Rp 84,814,420,931 | | Rp 9,119,488,372 | Rp 75,620,410,559 | Rp 74,522,000 | | 0 | | |
| | | Realisasi | Rp 81,475,536,527 | | Rp 8,619,454,372 | Rp 66,648,811,555 | Rp 6,207,270,600 | | Rp 3,338,884,404 | 96.06330578 | |
| 3 | 2018 | Anggaran | Rp 90,742,397,400 | | Rp 8,081,842,000 | Rp 82,610,555,400 | Rp 50,000,000 | | 0 | | |
| | | Realisasi | Rp 84,339,942,875 | | Rp 7,950,301,712 | Rp 67,420,546,263 | Rp 8,969,094,900 | | Rp 6,402,454,525 | 92.9443626 | |
| 4 | 2019 | Anggaran | Rp 105,525,697,563 | | Rp 7,677,553,200 | Rp 97,789,144,363 | Rp 59,000,000 | | 0 | | |
| | | Realisasi | Rp 100,394,216,282 | | Rp 7,571,787,503 | Rp 69,498,938,156 | Rp 23,323,490,623 | | Rp 5,131,481,281 | 95.13722117 | |
| 5 | 2020 | Anggaran | Rp 66,730,028,455 | | Rp 6,683,701,510 | Rp 60,046,326,945 | Rp - | | 0 | | |
| | | Realisasi | Rp 64,863,794,560 | | Rp 6,637,417,237 | Rp 43,400,556,123 | Rp 14,825,821,200 | | Rp 1,866,233,895 | 97.20330721 | |

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam konteks pembangunan daerah, maka Pemerintah Provinsi Jambi sebagai bagian dari subsistem yang terintegrasi secara nasional juga memiliki kontribusi terhadap pola pembangunan nasional.

Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJPD Provinsi Jambi yang menuntut peran Sekretariat Daerah menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan berkelanjutan dan perbaikan kinerja lembaga. Sekretariat Daerah Provinsi Jambi bertugas membantu Gubernur Jambi dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi.

Sekretaris Daerah Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan Gubernur. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi dibantu oleh 3 (tiga) Asisten yang masing-masing Asisten mengkoordinasikan 3 (tiga) Biro sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional.

Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD), sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh Perangkat Daerah (PD) itu sendiri dan yang tidak dapat dijangkau oleh Perangkat Daerah (PD) karena keterbatasan kewenangannya.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jambi yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Perangkat Daerah (PD), ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan prioritas program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :

1. Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020 masuk dalam kategori B, perlu adanya perbaikan untuk meningkat masuk dalam kategori BB.
2. Penataan ketatalaksanaan perangkat daerah masih belum optimal.
3. Penataan kelembagaan perangkat daerah masih belum optimal sehingga masih terdapat tumpang tindih tugas pokok dan fungsi.
4. Perumusan indikator kinerja dalam perencanaan strategis tingkat Perangkat Daerah (PD) masih belum optimal.
5. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah.
6. Tingkat koordinasi antar Perangkat Daerah (PD) dalam hal penanganan kebencanaan masih sangat rendah, terutama dalam menghadapi virus covid-19 saat ini.
7. Kuantitas SDM bidang hukum yang tersedia masih kurang memadai.
8. Kualitas dan kuantitas SDM yang memiliki keterampilan dan kompetensi pada lingkup Sekretariat Daerah masih kurang.

9. Kurangnya Koordinasi Antar Biro dalam penyusunan dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah.
10. Sarana dan prasarana yang masih kurang memadai untuk memberikan kenyamanan sebagai salah satu faktor penunjang kinerja aparatur.
11. Jumlah dan kapasitas aparatur belum sesuai dengan beban kerja.
12. Pola pembinaan aparatur yang belum berorientasi pada peningkatan kinerja.
13. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.
14. Penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi Tahun 2020 masuk dalam kategori Tinggi, perlu adanya perbaikan untuk meningkat masuk ke dalam kategori Sangat Tinggi.
15. Percepatan penyelesaian batas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
16. Belum meratanya Akses terhadap Pendidikan yang berkualitas.
17. Sinergitas antar stakeholder yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian belum terjalin dengan baik, hal ini dikarenakan adanya perbedaan persepsi diantara stakeholder terkait dengan tugas dan fungsi.
18. Data laporan yang disampaikan oleh Perangkat Daerah (PD) belum tepat waktu dan kurang akurat.
19. Belum tersedianya aplikasi yang dapat menyajikan data dan informasi yang terbaru yang dibutuhkan pimpinan untuk memonitor progres pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

20. Adanya perbedaan pemahaman terkait pelaksanaan fungsi monitoring dan evaluasi pembangunan yang menimbulkan dualisme persepsi, antara monitoring evaluasi pada aspek pelayanan dan monitoring evaluasi pada aspek perencanaan.
21. Belum tersedianya aplikasi yang dapat menyajikan informasi pembangunan Provinsi Jambi yang sudah tercapai selama rentang waktu satu tahun anggaran yang sudah dilaksanakan.
22. Belum sinergi pelaporan pelaksanaan pembangunan yang bersumber pada dana transfer pusat ke daerah (APBN), dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, sehingga fungsi pengawasan yang menjadi porsi gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah berjalan dengan maksimal.
23. Penanganan permasalahan perekonomian, pengendalian pembangunan, pengelolaan SDA dan kesejahteraan sosial masyarakat Provinsi Jambi.
24. Kurangnya Pemanfaatan Ilmu teknologi dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas, secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2021-2026, adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan seiring berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks, mengikuti perkembangan, perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perijinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan masyarakat Provinsi Jambi terhadap kebutuhan pelayanan prima perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal (*public services and public complaint*). Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai “**pelayan masyarakat**”. Selain itu, sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Provinsi Jambi dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakikatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk

meningkatkan kinerja seluruh aparat pemerintah provinsi, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

3. Restrukturisasi Organisasi dan Manajemen Publik

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) memerlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan (*Institutional re-engineering*) yang ramping struktur, kaya fungsi. Keberhasilan tujuan tersebut tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Faktor kunci keberhasilan restrukturisasi kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat umum sebagai *stakeholder*, Pemerintah Daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai *shareholder*.

Jika demikian halnya, maka manajemen sektor publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan profesionalisme birokasinya, melalui penataan pegawai, meninjau kembali model pendidikan dan pelatihan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

4. Manajemen Keuangan dan Aset Daerah

Keuangan dan aset daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah, oleh karena itu manajemen keuangan dan aset daerah

menjadi sesuatu hal yang strategis dalam pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di daerah. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata sistem pembiayaan, sistem penganggaran, dan sistem akuntansi serta sistem pemeriksaan. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan dana masyarakat (*public fund*) dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep *money follow program* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Manajemen aset daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, pengamanan dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif.

Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan aset daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut: Inventarisasi tanah dan bangunan, sertifikasi kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah, sistem pelaporan kegiatan tukar menukar, hibah, *ruislag*; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah; (3) Pengamanan aset daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi, Misi dan Program pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, disamping RPJMN. RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini merupakan tahapan keempat dari RPJPD Provinsi Jambi.

Dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024, maka Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2021 – 2026, yaitu :

“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Jambi Maju : Suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman.

- Jambi Aman** :Tercipta dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.
- Jambi Nyaman** : Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.
- Jambi Tertib** :Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.
- Jambi Amanah** : Membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang religius dan mengayomi seluruh masyarakat yang

plural.

Jambi Profesional : Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan 3 (tiga) misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, yaitu:

- 1 **Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.
- 2 **Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.
- 3 **Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia**, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2021 – 2026 tersebut diatas, maka Sekretariat Daerah sebagai Perangkat Daerah memiliki fungsi strategis karena mempunyai tugas dan

kewajiban membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pengkoordinasian menyusun kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.

Adapun fungsi Sekretariat Daerah dalam kaitannya pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah Provinsi meliputi pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial, perekonomian dan pembangunan serta administrasi sebagai bahan penetapan kebijakan Gubernur Jambi;
2. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum lingkup Sekretariat Daerah;
3. Penyelenggaraan kepemimpinan manajemen pada Sekretariat Daerah;
4. Penyelenggaraan koordinasi dan pelayanan administratif, supervisi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi oleh Perangkat Daerah; dan
5. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Staf Ahli Gubernur.

Dalam kaitannya untuk mewujudkan tercapainya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2021 – 2026, Sekretariat Daerah memiliki kontribusi baik langsung maupun tidak langsung dengan 3 (tiga) misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Sekretariat Daerah dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan sehingga arah pelaksanaan

pembangunan menjadi lebih tepat sasaran.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari dokumen lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

1. Optimalisasi kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan Daerah.
2. Efektifitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kelembagaan perangkat daerah.
3. Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia yang terdidik dan agamis.
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang berdasarkan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE).
6. Penataan produk hukum dan meningkatkan budaya taat hukum.
7. Optimalisasi Penyelenggaraan pemerintahan umum.
8. Optimalisasi evaluasi produk hukum daerah.
9. Optimalisasi penataan Kelembagaan dan ketata laksanaan Perangkat Daerah.
10. Optimalisasi sarana kerja terutama tata ruang kerja yang belum dapat memberikan kenyamanan dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur.
11. Meningkatkan nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jambi menjadi kategori Sangat Tinggi.
12. Percepatan penyelesaian Batas antar Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Jambi.
13. Optimalisasi pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan
14. Optimalisasi fungsi kooordinasi dan fasilitasi antar perangkat daerah.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan keterlibatan partisipatif seluruh aparatur Sekretariat Daerah melalui

peningkatan kualitas peningkatan kapasitas SDM, pemantapan kelembagaan Biro, dan peningkatan sarana dan prasarana kerja.

3.4 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Berdasarkan target capaian program Pemerintah Pusat yang perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah serta relevan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah adalah Program Reformasi Birokrasi dengan sasaran programnya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Publik;
2. Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kelembagaan;
3. Peningkatan Efektivitas dan efisiensi Ketatalaksanaan;
4. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur;
5. Peningkatan Akuntabilitas;
6. Peningkatan kualitas dan optimalisasi;
7. Pengendalian Pembangunan; dan
8. Peningkatan Budaya Kerja/Etika Birokrasi

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang Provinsi Jambi yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang.

RTRWK berfungsi sebagai :

- a. Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kab/Kota; serta
- b. Acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang Provinsi.

Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi :

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang provinsi, dan rencana sektoral lainnya;
- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang provinsi;
- c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e. Penataan ruang kawasan strategis provinsi.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas :

- a. kebijakan dan strategi struktur ruang;
- b. kebijakan dan strategi pola ruang; dan
- c. kebijakan dan strategi kawasan strategis provinsi.

3.6 Pencermatan Lingkungan Strategis

A. Lingkungan Internal

1) Kekuatan

- (a) Komitmen Pimpinan.
- (b) Struktur perangkat daerah yang lengkap.
- (c) SDM yang cukup banyak.
- (d) Adanya TPP.
- (e) Wilayah yang luas.
- (f) Kebijakan Pembangunan yang terencana.

2) Kelemahan

- (a) Sistem, Prosedur, Aturan, dan tata hubungan kerja yang belum berjalan dengan baik.
- (b) Rendahnya Disiplin Pegawai ASN.
- (c) Rendahnya respon terhadap keluhan masyarakat.
- (d) Lemahnya Database.

- (e) Belum meratanya distribusi pegawai.
- (f) Relatif terbatasnya ketersediaan anggaran dalam penyelenggaraan program kegiatan.

B. LINGKUNGAN EKSTERNAL

1) Peluang

- (a) Kedudukan Sekretaris Daerah sebagai Ketua TAPD, Ketua TIM Penilai Kinerja Pegawai, Koordinator pengelolaan Barang Milik Daerah, Sekretaris Gubernur.
- (b) Potensi Sumber Daya Alam dan letak yang strategis.
- (c) Otonomi daerah dan tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
- (d) Stabilitas keamanan yang terjamin.

2) Tantangan

- (a) Adanya tuntutan transparansi dan reformasi birokrasi.
- (b) Globalisasi dan birokrasi berkelas dunia.
- (c) Belum optimalnya koordinasi instansi vertikal.
- (d) Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.
- (e) Kuatnya intervensi eksternal terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota atau provinsi dengan kabupaten dan kota, diatur berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, diselenggarakan berdasarkan kriteria tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Salah satu yang menopang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah berfungsi sangat strategis dalam melaksanakan pelayanan informasi, administrasi dan bahkan berbagai aspek fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan demikian peranan dan fungsi serta kinerja Sekretaris Daerah begitu penting dan sangat strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan Daerah. Tujuan, dan Sasaran yang erat kaitannya dengan tugas Sekretariat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Bab ini memuat tujuan dan sasaran RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Jambi yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jambi ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Provinsi Jambi, dan isu-isu strategis yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya.

Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program biro-biro.

Tabel. 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah

1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

| Tujuan | Sasaran Renstra | Indikator | Satuan | Awal | Target | | | | | |
|--|--|---|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas | Meningkatnya kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Jambi | Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Jambi > 2,900 | Skor | 2,8491 | >2,500 | >2,600 | >2,700 | >2,800 | >2,850 | >2,900 |
| | | Persentase penyelesaian batas antar Kabupaten/Kota | Persentase | 70, 5 % (12 Permendagri sub segmen batas dari 17 subsegmen) | 76,5 % (13 Perme ndagri sub segmen batas dari 17 subsegmen) | 76,5 % (13 Perme ndagri sub segmen batas dari 17 subsegmen) | 76,5 % (13 Perme ndagri sub segmen batas dari 17 subsegmen) | 76,5 % (13 Perme ndagri sub segmen batas dari 17 subsegmen) | 82,4 % (14 Perme ndagri sub segmen batas dari 17 subsegmen) | 88,5 % (15 Perme ndagri sub segmen batas dari 17 subsegmen) |

2. Biro Kesejahteraan Rakyat

| Tujuan | Sasaran Renstra | Indikator | Satuan | Awal | Target | | | | | |
|---|--|------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Terwujudnya Fasilitasi Kesra Bidang Bina Mental Spiritual, Kesra Non Pelayanan Dasar, dan Kesra Pelayanan Dasar | Meningkatnya Kualitas Rekomendasi Kesra Bidang Bina Mental Spiritual | Jumlah Rekomendasi yang Ditetapkan | Jumlah Rekomendasi | 6 Rekomendasi | 11 Rekomendasi | 11 Rekomendasi | 11 Rekomendasi | 11 Rekomendasi | 11 Rekomendasi | 11 Rekomendasi |
| | Meningkatnya Kualitas Rekomendasi Kesra Bidang Kesra Pelayanan Dasar | Jumlah Rekomendasi yang Ditetapkan | Jumlah Rekomendasi | 10 Rekomendasi | 13 Rekomendasi | 13 Rekomendasi | 13 Rekomendasi | 13 Rekomendasi | 13 Rekomendasi | 13 Rekomendasi |
| | Meningkatnya Kualitas Rekomendasi Kesra Bidang Kesra Non Pelayanan Dasar | Jumlah Rekomendasi yang Ditetapkan | Jumlah Rekomendasi | 8 Rekomendasi | 11 Rekomendasi | 11 Rekomendasi | 11 Rekomendasi | 11 Rekomendasi | 11 Rekomendasi | 11 Rekomendasi |

3. Biro Hukum

| Tujuan | Sasaran Renstra | Indikator | Satuan | Awal | Target | | | | | | Kondisi Akhir Renstra |
|---|---|---|--------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Terwujudnya Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi | Meningkatnya Harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat | Persentase Produk hukum Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi | | 100% (3200 Produk Hukum Daerah) | 100% (650 Produk Hukum Daerah) | 100% (650 Produk Hukum Daerah) | 100% (650 Produk Hukum Daerah) | 100% (650 Produk Hukum Daerah) | 100% (650 Produk Hukum Daerah) | 100% (650 Produk Hukum Daerah) | 100% (3900 Produk Hukum Daerah) |
| | | Persentase Produk Hukum daerah yang mampu diakses publik | | 90 % | 90 % | 90 % | 90% | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |

4. Biro Perekonomian

| Tujuan | Sasaran Renstra | Indikator | Satuan | Awal | Target | | | | | |
|--|--|--|--------|---|----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Setda dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, kelembagaan/ organisasi, dan tatalaksana yang profesional | Kelembagaan Pemerintah Provinsi Jambi yang tangguh dan handal sesuai prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran meningkat | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jambi tepat ukuran dan tepat fungsi | | 52,17% (24 SKPD yg dievaluasi) | 56,52% (26 SKPD) | 60,86% (28 SKPD) | 65,21% (30 SKPD) | 69,56% (32 SKPD) | 73,91% (34 SKPD) | 56,52% (26 SKPD) |
| | | Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi tepat ukuran dan tepat fungsi | | 54% (6 dari 11 Kab/Kota yg dievaluasi) | 63% (7 Kab/ Kota) | 72% (8 Kab/ Kota) | 81% (9 Kab/ Kota) | 90% (10 Kab/ Kota) | 100% (11 Kab/ Kota) | 63% (7 Kab/ Kota) |
| | Pelayanan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien, kualitas pelayanan publik, penguatan akuntabilitas kinerja, serta tata pemerintahan yang baik meningkat. | Persentase Penerapan ketatalaksanaan yang baik pada Pemerintah Provinsi Jambi | | 65,75% | 66,75% | 67,75% | 68,75% | 69,75% | 70,75% | 66,75% |
| | | Persentase Penerapan pelayanan publik dan evaluasi pelaksanaan RB Provinsi Jambi, dan Kab/Kota | | 66,36% | 67,36% | 68,36% | 69,36% | 70,36% | 71,36% | 67,36% |
| | | IKM Pemerintah Provinsi Jambi | | B | B | B | A | A | A | B |
| | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi | | CC | B | B | B | A | A | B |
| | | Persentase Kabupaten/Kota yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja "CC" | | 45% (5 Kab/ Kota) | 54,5% (6 Kab/ Kota) | 72,7% (8 Kab/ Kota) | 81,8% (9 Kab/ Kota) | 90,9% (10 Kab/ Kota) | 100% (11 Kab/ Kota) | 54,5% (6 Kab/ Kota) |
| | | Persentase penerapan budaya kerja Pemerintah Provinsi Jambi | | 0% (0 SKPD) | 6,52% (3 SKPD) | 10,86% (5 SKPD) | 13,04% (6 SKPD) | 17,39% (8 SKPD) | 21,7% (10 SKPD) | 6,52% (3 SKPD) |
| | | Persentase penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (AD-PPK) | | 61,75% | 62,75% | 63,75% | 64,75% | 65,75% | 66,75% | 62,75% |
| | | Persentase Rekomendasi Staf Ahli | | 100% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |

| Tujuan | Sasaran Renstra | Indikator | Satuan | Awal | Target | | | | | |
|--------|--|--|--------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Gubernur Jambi yang ditindaklanjuti | | | (1 rekomendasi) | (1 rekomendasi) | (1 rekomendasi) | (1 rekomendasi) | (1 rekomendasi) | (1 rekomendasi) |
| | | Persentase Terlayannya Kinerja Pelayanan Staf Ahli Gubernur Jambi | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Kualitas sumber daya aparatur, serta pelayanan bagi aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi meningkat | Persentase penataan Tata Usaha Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase penyelesaian seleksi administrasi mutasi kepegawaian | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase Terlayannya Administrasi Kepegawaian Setda Provinsi Jambi | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Jumlah pemberian bantuan kontribusi kursus, pelatihan, bimtek, bagi PNS lingkup Setda Provinsi Jambi | | 138 orang | 30 orang | 30 orang | 30 orang | 30 orang | 30 orang | 138 orang |
| | | Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan Setda | | 100% (477 orang) | 2% (80 orang) | 2% (90 orang) | 2% (100 orang) | 2% (110 orang) | 2% (120 orang) | 100% (477 orang) |

5. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

| Tujuan | Sasaran Renstra | Indikator | Satuan | Awal | Target | | | | | |
|---|---|--|--------|------|--------|------|------|------|------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Terwujudnya Tata Kelola Pengadaan Barang /Jasa yang berkualitas | | Proses Pengadaan Memenuhi Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa | Persen | 70% | 70% | 73% | 75% | 80% | 85% | 90% |
| | Meningkatnya Layanan Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik | Prosentase Publikasi Pengadaan Barang dan Jasa secara Update. | Persen | 65% | 65% | 75% | 85% | 95% | 100% | 100% |
| | Meningkatnya Layanan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Prosentase Seleksi Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa tepat waktu. | Persen | 50% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| | Menurunnya Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa. | Prosentase Penurunan Sanggahan/sengketa Pengadaan Barang dan Jasa. | Persen | 45% | 40% | 35% | 30% | 25% | 20% | 15% |

6. Biro Administrasi Pembangunan

| Tujuan | Sasaran Renstra | Indikator | Satuan | Awal | Target | | | | | |
|--|--|--|--------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, dengan pelayanan publik berkualitas | Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah | Persentase capaian kinerja pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah | | | 82 % | 84 % | 86 % | 88 % | 90 % | 82 % |
| | | Persentase capaian kinerja pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah | | | 50 % | 60 % | 60 % | 65 % | 70 % | 50 % |
| | | Persentase capaian kinerja pembangunan daerah | | | 82 % | 83 % | 85 % | 87 % | 90 % | 82 % |
| | | Persentase capaian rumusan kebijakan di bidang pembangunan | | | 6 rumusan | 6 rumusan | 6 rumusan | 6 rumusan | 6 rumusan | 6 rumusan |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan pada instansi / lembaga pemerintah daerah yang melayani publik | Indeks kepuasan terhadap pelayanan biro (Nilai IKM) | | | 74 % | 76 % | 78 % | 80 % | 82 % | 74 % |

7. Biro Organisasi

| Tujuan | Sasaran Renstra | Indikator | Satuan | Awal | Target | | | | | |
|--|--|--|--------|------|--------|-------|-------|-------|------|-------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Menjadi institusi pendorong terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis melalui reformasi birokrasi | Meningkatnya Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah | Persentase Tingkat Ketercapaian Sasaran Area Perubahan Reformasi Birokrasi | | | 61,50 | 62,80 | 63,10 | 64,50 | 65 | 61,50 |

8. Biro Umum

| Tujuan | Sasaran Renstra | Indikator | Satuan | Awal | Target | | | | | |
|--|---|--|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas | Meningkatnya kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Jambi | Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Jambi > 2,900 | Skor | 2,8491 | >2,500 | >2,600 | >2,700 | >2,800 | >2,850 | >2,900 |
| | Meningkatnya rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggara | Jumlah produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi | Jumlah produk hukum | 3496 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | Persentase penyelesaian kasus hukum dan HAM Provinsi Jambi | Persen | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas kinerja, dan keuangan Sekretariat Daerah | Opini atas laporan keuangan Sekretariat Daerah | SAP | Sesuai SAP | Sesuai SAP | Sesuai SAP | Sesuai SAP | Sesuai SAP | Sesuai SAP | Sesuai SAP |
| | Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah | Persentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Seretaris Daerah yang di dfasilitasi | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Menjadi institusi pendorong terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis melalui | Meningkatnya Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah | Persentase Tingkat Ketercapaian Komponen Area Perubahan Reformasi Birokrasi | Persen | | 61,50 | 62,80 | 63,10 | 64,50 | 65 | |

| Tujuan | Sasaran Renstra | Indikator | Satuan | Awal | Target | | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------|--------|------|--------|------|------|------|------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| reformasi birokrasi | | | | | | | | | | |

9. Biro Administrasi Pimpinan / Humas Protokol

| Tujuan | Sasaran Renstra | Indikator | Satuan | Awal | Target | | | | |
|---|--|--|--------|------|--------|------|------|------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Terwujudnya Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi | Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja | Nilai AKIP Setda | Skor | NA | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| | | IKM Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda | IKM | NA | 80.03 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| | Meningkatnya Pelayanan Keprotokolan dan Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | IKM Fasilitas Keprotokolan | IKM | NA | 85 | 86 | 88 | 89 | 90 |
| | | Persentase Pemenuhan Materi Acara/Rapat Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah | persen | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.2 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.2.
Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah

1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan | Penang-gung Jawab |
|-----|---|--|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatnya kemampuan penyelenggaraa n pemerintahan daerah di Provinsi Jambi | Nilai Laporan Penyelenggara an Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi > 2,900 | Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah disampaikan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 bulan setelah bearkirnya tahun anggaran | Biro Pemerintaha n dan Otda |
| | | Persentase penyelesaian batas antar Kabupaten /Kota | Menurunnya sengketa batas wilayah administrasi dan percepatan penyelesaian batas Kabupaten/ Kota se- Provinsi Jambi | Biro Pemerintaha n dan Otda |

2. Biro Kesejahteraan Rakyat

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan | Penang-gung Jawab |
|-----|--|--|--|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat | Persentase kualitas dan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | Jumlah kualitas dan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran yang dicapai dibagi Jumlah target kualitas dan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran yang ingin dicapai X 100% | Biro Kesra Setda Provinsi Jambi |
| 2 | | Persentase rekomendasi kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan | Jumlah rekomendasi kesra yang dicapai dibagi Jumlah target rekomendasi kesra yang ingin dicapai X 100% | Biro Kesra Setda Provinsi Jambi |

3. Biro Hukum

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan | Penang-gung Jawab |
|-----|---|--|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Biro | Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Biro | Jumlah layanan yang dilaksanakan dibagijumlah layanan perkantoran dikali 100%. | Biro Hukum Setda Provinsi Jambi |
| 2 | Meningkatnya penataan produk hukum dan meningkatnya budaya taat hukum | Persentase penyelesaian produk hukum daerah dan permasalahan hukum | Jumlah Indikator (item) produk hukum yang difasilitasi/ dievaluas i dibagi dengan jumlah produk hukum yang diajukan dikali 100% | Biro Hukum Setda Provinsi Jambi |

4. Biro Perekonomian

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan | Penang-gung Jawab |
|-----|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatnya kualitas administrasi serta koordinasi kegiatan Perekonomian daerah | 1. Jumlah dokumen laporan capaian perencanaan 2. Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan iktisar 3. Jumlah dokumen laporan capaian kinerja | Laporan dari setiap sub kegiatan dan hasil rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD | Biro Perekonomi an dan SDA Setda Provinsi Jambi |
| 2 | Tersedianya data dari Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 1. Jumlah dokumen laporan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Laporan dari Masing-masing Bagian di Biro APSDA dan Laporan Renstra, Renja, dan Laporan Lainnya dari Tahun Sebelumnya. | Biro Perekonomi an dan SDA Setda Provinsi Jambi |
| 3 | Penyiapan penyusunan dan pengolahan bahan-bahan pembinaan dan perumusan kebijakan, pengendalian, pemantauan, koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi serta pelaporan bidang Kebijakan Perekonomian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku | 1. Jumlah dokumen Pengelola kebijakan Ekonomi Makro yang difasilitasi di Provinsi Jambi 2. Jumlah dokumen Pengelola kebijakan Ekonomi Mikro yang difasilitasi di Provinsi Jambi | Laporan daerah, forum rapat koordinasi pusat dan daerah, hasil monitoring dan evaluasi. | Biro Perekonomi an dan SDA Setda Provinsi Jambi |
| 4 | Penyiapan penyusunan dan pengolahan bahan-bahan pembinaan dan perumusan kebijakan, pengendalian, pemantauan, koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi serta pelaporan bidang Sumber Daya Alam sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku | 1. Jumlah Dokumen Bidang Pertanian, Kehutanan,Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi di Provinsi Jambi 2. Jumlah Dokumen Bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang difasilitasi di Provinsi Jambi 3. Jumlah Dokumen Bidang Energi dan Air yang difasilitasi di Provinsi Jambi | Laporan daerah, forum rapat koordinasi provinsi dan kab/kota, hasil monitoring dan evaluasi. | Biro Perekonomi an dan SDA Setda Provinsi Jambi |

5. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan | Penanggung Jawab |
|-----|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatnya Layanan Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik | Prosentase Publikasi Pengadaan Barang dan Jasa secara Update. | Jumlah data yang dipublikasi dibagi Jumlah data yang wajib dipublikasi X 100% | Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi |
| 2 | Meningkatnya Layanan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Prosentase Seleksi Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa tepat waktu. | Lama hari Penyelesaian dibagi Lama hari ideal penyelesaian X 100% | Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi |
| 3 | Menurunnya Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa. | Prosentase Penurunan Sanggahan/sengketa Pengadaan Barang dan Jasa. | Jumlah sengketa tahun lalu dibagi Jumlah sengketa tahun ini X 100% | Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi |

6. Biro Administrasi Pembangunan

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan | Penanggung Jawab |
|-----|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah | Persentase capaian kinerja pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah | Capaian Kinerja dibagi target kinerja dikali 100% | Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi |
| 2 | | Persentase capaian kinerja pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah | Capaian Kinerja dibagi target kinerja dikali 100% | Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi |
| 3 | | Persentase capaian kinerja pembangunan daerah | Capaian Kinerja dibagi target kinerja dikali 100% | Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi |
| 4 | | Persentase capaian rumusan kebijakan di bidang pembangunan | Jumlah rumusan kebijakan dibagi target rumusan kebijakan dikali 100% | Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi |

7. Biro Organisasi

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan | Penang-gung Jawab |
|-----|--|---|--|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatnya Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Sasaran Area Perubahan Reformasi Birokrasi | Persentase Capaian Area RB dibagi Persentase Target Area RB X 100% | Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi |

8. Biro Umum

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan | Penanggung Jawab |
|-----|---|--|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas kinerja, dan keuangan | Opini atas laporan keuangan Sekretariat | Jumlah Laporan Sesuai SAP | Biro Umum Setda Provinsi Jambi |
| 2 | Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah | Persentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang di dfasilitasi | Jumlah Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH yang di fasilitasi dibagi Jumlah Pengajuan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH X 100% | Biro Umum Setda Provinsi Jambi |

9. Biro Administrasi Pimpinan / Humas Protokol

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Formulasi | Penanggung Jawab |
|-----|---|--|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatnya kualitasPelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja | Nilai AKIP Setda | Penilaian | Subbagian Perencanaan danPelaporan |
| | | IKM Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda | (Total nilai persepsi perunsur x nilai penimbang) / Total UnsurTerisi | Subbagian Kepegawaian |
| 2 | Meningkatnya Pelayanan Keprotokolan dan Administrasi Kepala Daerah/Wakil KepalaDaerah | IKM Fasilitas Keprotokolan | (Total nilai persepsi perunsur x nilai penimbang) / Total UnsurTerisi | Bagian Protokol |
| | | Persentase Pemenuhan Materi Acara/Rapat Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah | (Jumlah Pelaksanaan Pemenuhan Materi Acara/Rapat Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah) / Jumlah Acara Acara/Rapat Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan) x 100 | Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Pembangunan

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang dirumuskan dengan kriterianya mencakup:

- (a) hubungan yang rasional antara visi dan misi dengan prioritas program kepala daerah terpilih,
- (b) hubungan yang kuat dengan analisis daerah dan isu-isu strategik,
- (c) pernyataan yang umum guna memandu pengembangan program pembangunantahunan selama lima tahun, dan
- (d) dikembangkan dalam suatu pemetaan strategi daerah. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah pengembangan program prioritas kepala daerah.

Strategi yang dibuat pada hakekatnya tidak berdiri sendiri namun berhubungan dengan strategi pembangunan nasional karena pada dasarnya pembangunan nasional merupakan akumulasi dari pembangunan – pembangunan di daerah. Strategi pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 adalah strategi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi yang mendukung strategi pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2020 - 2024. Adapun strategi pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 5.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Provinsi Jambi
Tahun 2021-2026

| VISI : Terwujudnya Jambi Mantap, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT | | |
|--|---|---|
| Tujuan | Sasaran | Strategi |
| Misi 1 : memantapkan Tata Kelola Pemerintah | | |
| Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan,danak untabel dengan pelayanan publik berkualitas | Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel | Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) |
| | | Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah serta pengembangan gerakan pemberantasan korupsi |
| | | Percepatan proses perizinan BBNKB bagi kendaraan yang bernomor polisi luar daerah |
| | | Peningkatan pengelolaan keuangan untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian |
| | | Peningkatan pengawasan, pembinaan kinerja dan penerapan disiplin disertai reward dan punishment yang tegas bagi pelanggaran sumpah jabatan, aturan disiplin dan etika birokrasi |
| | | Pengembangan budaya hukum secara terintegrasi melalui jalur pendidikan formal, informal dan non formal |
| | | Penataan batas wilayah provinsi |
| | | penegakan hukum terhadap pelanggaran PERDA secara tegas, profesional, dan adil dengan penguatan kelembagaan dan personil PPNS dengan peningkatan jumlah dan kualitas PPNS daerah |
| | Terwujudnya Birokrasi yang kapabel dnegan pelayanan publik yang prima | Peningkatan kinerja birokrasi melalui perbaikan prosedur kerja, pemanfaatan teknologi, transparansi serta regulasi, pengawasan, penegakan aturan dan peningkatan tunjangan daerah |
| | | Peningkatan kapasitas ASN dan PPPK |
| | | Penyederhanaan birokrasi dan perizinan |
| | | Menerapkan revolusi industri 4.0 dan society 5.0 |
| Misi 2 : memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah | | |
| Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna | Memantapkan Pengelolaan Komoditas Unggulan non pertambangan | Peremajaan sawit rakyat, karet rakyat dan kelapa dalam rakyat |
| | | Pengadaan sarana prasarana pertanian serta bantuan bibit ternak bagi keluarga miskin |
| | | mendorong pengembangan komoditas unggulan daerah |
| | | Peningkatan produktivitas pertanian |

| VISI : Terwujudnya Jambi Mantap, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT | | |
|---|---|--|
| Tujuan | Sasaran | Strategi |
| meningkatkan kesejahteraan masyarakat | | melalui praktek pertanian yang baik, pemberdayaan dan peningkatan kualitas produk |
| | | Membangun database petani menurut komoditas yang diusahakan |
| | | Peningkatan SDM pertanian dan peningkatan penguasaan pemanfaatan teknologi tepat guna |
| | | revitalisasi pertanian, peternakan dan perkebunan |
| | Meningkatnya industri pengolahan | fasilitasi percepatan pengembangan industri hilir CPO, karet dan kelapa dalam |
| | | Mendorong pembangunan sarana pelabuhan ekspor berstandar internasional dan wilayah zonasi ekonomi untuk kawasan Ujung Jabung |
| | | Pengembangan kawasan Sentusa (Sengeti-Tungkal-Sabak) |
| | | bantuan modal kerja bagi UMKM/ industri rumah tangga |
| | | Menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan industri hijau ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui dukungan fiskal maupun non fiskal |
| | Meningkatkan peran sektor pariwisata serta industri kecil dan menengah pendukung pariwisata | Mensinergikan usaha BUMD dengan UMKM dalam hal produksi dan pemasaran |
| | | Penguatan kelembagaan koperasi dan pusat pemasaran produk-produk UMKM Provinsi Jambi |
| | | Dukungan fasilitas e-bisnis untuk usaha industri rumah tangga, pariwisata dan ekonomi kreatif |
| | | Pengembangan objek dan destinasi tujuan wisata berbasis masyarakat lokal |
| | | membangun digitalisasi pemasaran produk-produk UMKM dan fasilitasi akses perbankan |
| | | mendorong percepatan pengembangan kawasan pariwisata percandian Muaro Jambi dan geopark Merangin sebagai destinasi wisata dunia |
| | | Fasilitasi penyelenggaraan event seni budaya berskala nasional/internasional dengan melibatkan kabupaten/kota |
| | | Revitalisasi dan fasilitasi objek wisata unggulan di kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi |
| | | membangun ekowisata berbasis jasa lingkungan dengan |
| | | |

| VISI : Terwujudnya Jambi Mantap, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT | | |
|---|--|---|
| Tujuan | Sasaran | Strategi |
| | memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar | mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung kawasan |
| | | Fasilitasi dan peningkatankualitas prasarana transportasi darat, laut dan udara |
| | | Fasilitasi akses terhadap jaringan internet |
| | | Peningkatan sarana prasarana air minum perdesaan danperkotaan |
| | | Percepatan peningkatan kualitas jalan provinsi |
| | | Fasilitasi dan pembangunan jembatan |
| | | Fasilitasi percepatan pembangunan jalan khusus |
| | | Fasilitasi percepatan pembangunan jalan tol |
| | | Fasilitasi dan Percepatan pembangunan jalan dan infrastruktur penunjang menuju Pelabuhan Ujung Jabung |
| | | Fasilitasi peningkatan status jalan kabupaten dalam status mantap menjadi jalan provinsi dan jalan provinsi menjadi jalan nasional |
| | | Fasilitasi percepatan peningkatan status Pelabuhan Ujung Jabung |
| | | Fasilitasi peningkataninfrastruktur penunjang Pelabuhan Roro, Kuala Tungkal, Talang Duku, Muara Sabak, Mendahara, dan Nipah Panjang |
| | | Fasilitasi percepatan pembangunan rel kereta api Provinsi Jambi |
| | | fasilitasi percepatan pengembangan Bandar Udara Muaro Bungo dan Depati parbo |
| | | Pengembangan dan peningkatan bandar Udara Sultan Thaha Syaifuddin menjadi bandara internasional |
| | | Fasilitasi percepatan pembangunan dan pemanfaatan irigasi di wilayah Provinsi Jambi |
| | | Mendorong percepatan pembangunan dan pengembangan energi listrik bersumber energi baru terbarukan |
| | | Meningkatkan penyediaan air baku dan air layak minum |
| | | Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur permukiman dan perumahan yang layak |
| | Meningkatnya kualitas lingkungan | Peningkatan kualitas dan kelestarian sungai |

| VISI : Terwujudnya Jambi Mantap, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT | | |
|---|--|--|
| Tujuan | Sasaran | Strategi |
| | | restorasi lahan-lahan yang terancam dan kritis (GEBERMEWAH) |
| | | peningkatan perlindungan pengelolaan kawasan konservasi dan kawasan resapan air wilayah barat |
| | | Pengelolaan pemanfaatan lahan dengan teknologi ramah lingkungan |
| | | Pengelolaan dan rehabilitasi mangrove, estuaria dan teluk |
| | | pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan yang melibatkan masyarakat setempat |
| | | Peningkatan penggunaan energi bersih (clean energy) melalui pengembangan pemanfaatan energi baru dan terbarukan di perkotaan dan perdesaan |
| | | pengembangan Ruang Terbuka Hijau |
| | | Fasilitasi penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) |
| | | Fasilitasi percepatan pembangunan pusat logistik bencana Sumatera |
| | | Fasilitasi pengelolaan kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) terpadu melalui pendampingan dan perbaikan kelembagaan |
| | menurunkan tingkat pengangguran | Peningkatan keterampilan dan kompetensi calon tenaga kerja |
| | | Bantuan modal usaha untuk pedagang kecil atau usaha rumah tangga |
| | | Revitalisasi peran BLK |
| | | peningkatan life skill santri/santriwati |
| | | Fasilitasi pengembangan intelektualitas pemuda dan potensi-potensi kepemudaan lainnya |
| | meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan | Pembangunan kawasan lumbung pangan(food estate) |
| | | pengembangan kawasan kampung pangan terpadu |
| | | Mendorong pengembangan kawasan sentra produksi ternak |
| | | Fasilitasi peningkatan peran PPL yang tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu. |
| | | Peningkatan produksi potensi kelautan di Kabupaten Tanjab Barat dan Tanjab Timur |
| | | Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan lahan berpotensi untuk pangan di |

| VISI : Terwujudnya Jambi Mantap, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT | | |
|---|--|---|
| Tujuan | Sasaran | Strategi |
| | | Provinsi Jambi serta mendorong Kabupaten menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan |
| Misi 3 : Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia | | |
| Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang terdidik,sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender | Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat | Pemantapan kelembagaan Satgas Penanggulangan Covid-19 |
| | | Mendorong optimalisasi peran puskesmas |
| | | Pembangunan Rumah Sakit Khusus Wabah Penyakit Menular |
| | | Membangun fasilitas/ sarana prasarana penunjang kesehatan termasuk sarana prasarana transfusi darah |
| | | Subsidi BPJS bagi keluarga miskin |
| | | Dukungan kegiatan posyandu |
| | | Pengembangan RSUD Rd. Mattaher dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) |
| | | pembangunan stadion olahraga (Jambi Sport Center) |
| | | mendorong dan memfasilitasi kegiatan olahraga tertentu menjadi industri olahraga |
| | | Peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan SDM pelayanan serta optimalisasi promosi kesehatan |
| | | Peningkatan cakupan penerima jaminan kesehatan menuju cakupan 100% |
| | Meningkatnya kualitas Pendidikan | Pemberianbeasiswa dan bantuan pendidikan bagi siswa miskin |
| | | pemberian beasiswa |
| | | Dukungan fasilitas e-learning untuk keluarga miskin |
| | | Pengembangan SMK berbasis kompetensi dan keunggulan lokal |
| | | Penambahan RKB SMA/SMK |
| | | beasiswa bagi atlet berprestasi |
| | | Peningkatan peran swasta dalam pembangunan bidang olahraga |
| | | Pengembangan pusat pendidikan dan latihan pelajar olahraga unggulan |
| | | peningkatan rata-rata lama sekolah |
| | Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya | Peningkatan festival dan lomba budaya daerah |
| | | Peningkatan peran lembaga adat daerah dalam melestarikan adat budaya daerah |
| | | Pengembangan kurikulum muatan lokal sejarah Jambi dan hukum adat |
| | Meningkatnya | pembangunan Islamic Center |

| VISI : Terwujudnya Jambi Mantap, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT | | |
|---|---|--|
| Tujuan | Sasaran | Strategi |
| | toleransi intra dan antar agama | Pembangunan sarana prasarana agama termasuk sarana pendidikan keagamaan |
| | | peningkatan peran Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) dalam meningkatkan kerukunan intra dan antar umat beragama |
| | | Peningkatan Indeks aspek kebebasan sipil |
| | | Penguatan Rencana Aksi Penanganan Gangguan Keamanan dalam negeri |
| | | Peningkatan peran da'i dalam pembangunan |
| | | fasilitasi kualitas dan mutu pendidikan keagamaan (ponpes dan tahfiz) |
| | Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan | Peningkatan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi terutama di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup dan ekonomi |
| | | Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) |
| | | Peningkatan Usaha ekonomi produktif bagi perempuan rawan sosial ekonomi |
| | | Pembangunan pusat pelayanan terpadu, perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga |
| | | gerakan masyarakat dan media anti pornografi dan pornoaksi |
| | | peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak |

5.2 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi perangkat daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Kebijakan pembangunan Provinsi Jambi difokuskan

kepada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan merupakan turunan dari kebijakan pembangunan Nasional dengan mempertimbangkan keunggulan daerah dan kearifan lokal masyarakat Provinsi Jambi. Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi diprioritaskan pada sinergitas antara kebijakan nasional dan Provinsi Jambi dengan lebih mengutamakan penanganan pada permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah, diantaranya:

1. Penanggulangan dampak Pandemi Covid-19, baik dampak kesehatan, ekonomi maupun dampak sosial.
2. Pemulihan dan peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah, melalui Program “DUMISAKE”; peningkatan peran sektor pariwisata, perdagangan dan jasa; peningkatan produktivitas komoditas unggulan perbaikan rantai nilai serta hilirisasi produk.
3. Pengembangan Kawasan Ekonomi baru “SENTUSA” (Sengeti – Tungkal – Sabak)
4. Percepatan pembangunan infrastruktur transportasi, terutama percepatan penyelesaian akses menuju Ujung Jabung dan Pelabuhan Ujung Jabung.
5. Peningkatan kualitas dan ketersediaan jaringan irigasi, air bersih dan bendungan.
6. Percepatan pembangunan infrastruktur listrik dengan mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan, sehingga berkontribusi terhadap bauran energi daerah dan ramah lingkungan.
7. pendidikan, agama dan sosial budaya. Selain pembangunan rumah sakit khusus wabah, serta pengembangan dan revitalisasi infrastruktur dan kelembagaan yang telah ada saat ini, infrastruktur prioritas lain yang akan dibangun adalah islamic center dan Jambi Sport Center.
8. Peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan serta pengelolaan mitigasi perubahan iklim, melalui perlindungan pengelolaan kawasan konservasi,

pemanfaatan lahan dengan teknologi ramah lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau, peningkatan kelembagaan KARHUTLA, dan lain-lain.

9. Peningkatan dan pengembangan sektor pertanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, salah satunya melalui pengembangan food estate.
10. Peningkatan tata pemerintahan yang baik.
11. Peningkatan perlindungan sosial dan kepastian hukum. Selain meningkatkan kualitas perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial yang sudah ada saat ini, dalam periode RPJMD ini juga akan dibangun kampung modern Lansia.
12. Peningkatan kesetaraan gender, melalui peningkatan peran dan perlindungan perempuan.

Dalam upaya percepatan pengurangan ketimpangan pembangunan ada beberapa upaya yang akan dilakukan selama tahun 2021-2026, yaitu:

1. Program Unggulan DUMISAKE, yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menu yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, serta berupa bantuan keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa untuk menu yang bukan kewenangan Pemerintah Provinsi.
2. Meningkatkan konektivitas diantaranya
 - a. Percepatan pembangunan akses menuju Ujung Jabung dan Pelabuhan Ujung Jabung.
 - b. Fasilitas percepatan pembangunan jalan tol pada ruas yang melewati Provinsi Jambi.
 - c. Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan.
3. Membangun pusat pertumbuhan
 - a. Meningkatkan Peran dan fungsi PKN, PKNP, PKW dan PKL serta Kawasan strategis Pantai Timur Jambi.
 - b. Pengembangan kawasan ekonomi baru SENTUSA (Sengeti Tungkal Sabak).

- c. Mendorong Pengembangan Kawasan Industri Kemingking.
- d. Pengembangan Food Estate dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung wilayah.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan merupakan program prioritas pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Penyelarasan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Pemilihan kegiatan dari program prioritas tersebut dilaksanakan berdasarkan strategi dan kebijakan dalam mencapai visi dan misi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencaapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Indikator kinerja program (*outcome*/hasil) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.

Indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan

suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.

Data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) pada untuk setiap indikator kinerja merupakan data capaian awal tahun perencanaan dan menjadi titik tolak perumusan target kinerja pada periode perencanaan. Adapun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif terdapat dalam lampiran.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2021-2026

1. BIRO PEMERINTAHAN DAN OTDA

| Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|-----------------------------------|--|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--|-------------|---|
| | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| [2] | [3] | | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] |
| UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi |
| PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | Persentase Pemenuhan Administrasi, Keuangan dan Operasional Biro | 100% | 100% | 410,987,000 | 100% | 452,085,700 | 100% | 497,294,270 | 100% | 547,023,697 | 100% | 601,726,067 | 100% | 601,726,067 | |
| Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Predikat Akuntabilitas Kinerja | B | B | 63,987,000 | B | 70,385,700 | B | 77,424,270 | B | 85,166,697 | BB | 93,683,367 | BB | 93,683,367 | |
| 1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Renstra/Renja tersusun | 1 Dok | 1 Dok | 11,950,000 | 1 Dok | 13,145,000 | 1 Dok | 14,459,500 | 1 Dok | 15,905,450 | 1 Dok | 17,495,995 | 1 Dok | 17,495,995 | |
| 2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA tersusun | 1 Dok | 1 Dok | 11,900,000 | 1 Dok | 13,090,000 | 1 Dok | 14,399,000 | 1 Dok | 15,838,900 | 1 Dok | 17,422,790 | 1 Dok | 17,422,790 | |
| 3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen perubahan RKA tersusun | 1 Dok | 1 Dok | 8,531,000 | 1 Dok | 9,384,100 | 1 Dok | 10,322,510 | 1 Dok | 11,354,761 | 1 Dok | 12,490,237 | 1 Dok | 12,490,237 | |
| 4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA tersusun | 1 Dok | 1 Dok | 11,506,000 | 1 Dok | 12,656,600 | 1 Dok | 13,922,260 | 1 Dok | 15,314,486 | 1 Dok | 16,845,935 | 1 Dok | 16,845,935 | |
| 5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah dokumen Perubahan DPA tersusun | 1 Dok | 1 Dok | 7,800,000 | 1 Dok | 8,580,000 | 1 Dok | 9,438,000 | 1 Dok | 10,381,800 | 1 Dok | 11,419,980 | 1 Dok | 11,419,980 | |
| 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen LKPJ/LKJ tersusun | 2 Dok | 2 Dok | 12,300,000 | 2 Dok | 13,530,000 | 2 Dok | 14,883,000 | 2 Dok | 16,371,300 | 2 Dok | 18,008,430 | 2 Dok | 18,008,430 | |
| Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi, Keuangan dan Operasional Biro | 87,90 | 88,60 | 347,000,000 | 88,70 | 381,700,000 | 88,80 | 419,870,000 | 88,85 | 461,857,000 | 88,90 | 508,042,700 | 88,90 | 508,042,700 | |
| 1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor Biro | 100% | 100% | 130,000,000 | 100% | 143,000,000 | 100% | 157,300,000 | 100% | 173,030,000 | 100% | 190,333,000 | 100% | 190,333,000 | |
| 2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Penyediaan alat pelindung diri pegawai Biro | | 30 Orang | 35,000,000 | 30 Orang | 38,500,000 | 30 Orang | 42,350,000 | 30 Orang | 46,585,000 | 30 Orang | 51,243,500 | 30 Orang | 51,243,500 | |
| | Persentase peralatan rumah tangga kantor yang disediakan | | 100% | - | 100% | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | | |
| 3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan administrasi perkantoran Biro yang bersifat umum | 100% | 100% | 37,000,000 | 100% | 40,700,000 | 100% | 44,770,000 | 100% | 49,247,000 | 100% | 54,171,700 | 100% | 54,171,700 | |
| 4 Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Kantor | Jumlah peserta rapat tamu rumah tangga Biro dan lain-lain | | 100 orang | 20,000,000 | 100 orang | 22,000,000 | 100 orang | 24,200,000 | 100 orang | 26,620,000 | 100 orang | 29,282,000 | 100 orang | 29,282,000 | |
| 5 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar provinsi yang difasilitasi | 100% | 100% | 125,000,000 | 100% | 137,500,000 | 100% | 151,250,000 | 100% | 166,375,000 | 100% | 183,012,500 | 100% | 183,012,500 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi > 2,900 | Skor 2,8491 dengan Status Kinerja Tinggi | 2.600 | 1,910,770,000 | 2.700 | 2,101,847,000 | 2.800 | 2,312,031,700 | 2.850 | 2,543,234,870 | 2.900 | 2,797,558,357 | 2.900 | 2,797,558,357 |
| Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan | Persentase penyelesaian batas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. | 70,5 % (12 Permendagri sub segmen batas dari 17 sub segmen) 70,5% | 70.6% | 968,413,000 | 70.6% | 1,065,254,300 | 76.5% | 1,171,779,730 | 82.4% | 1,288,957,703 | 88.2% | 1,417,853,473 | 88.2% | 1,417,853,473 |
| ¹ Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan | Laporan kebijakan teknis adm. Pertanahan | 1 dokumen | 1 dokumen | 412,343,000 | 1 buku | 453,577,300 | 1 buku | 498,935,030 | 1 buku | 548,828,533 | 1 buku | 603,711,386 | 1 buku | 603,711,386 |
| ² Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum | Laporan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kabupaten/Kota dalam Penerapan SPM | 1 dokumen | 1 dokumen | 170,152,000 | 1 Dok | 187,167,200 | 1 Dok | 205,883,920 | 1 Dok | 226,472,312 | 1 Dok | 249,119,543 | 1 Dok | 249,119,543 |
| ³ Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Wilayah | Persentase penyelesaian batas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. | 70.5 %, % (12 Permendagri) | 70.5 %, % (12 Permendagri) | 385,918,000 | 70.6% | 424,509,800 | 76.5% | 466,960,780 | 82.4% | 513,656,858 | 88.2% | 565,022,544 | 88.2% | 565,022,544 |
| Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah | Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi > 2,900 | Skor 2,8491 dengan Status Kinerja Tinggi | 2.600 | 788,358,000 | 2.700 | 867,193,800 | 2.800 | 953,913,180 | 2.850 | 1,049,304,498 | 2.900 | 1,154,234,948 | 2.900 | 1,154,234,948 |
| ¹ Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD | Pelayanan administrasi pemerintahan KDH/WKDH, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota | 100% | 100% | 218,846,000 | 100% | 240,730,600 | 100% | 264,803,660 | 100% | 291,284,026 | 100% | 320,412,429 | 100% | 320,412,429 |
| ² Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan | Laporan koordinasi pengembangan otda dan penataan urusan | 1 Laporan | 1 Laporan | 238,444,000 | 1 Laporan | 262,288,400 | 1 Laporan | 288,517,240 | 1 Laporan | 317,368,964 | 1 Laporan | 349,105,860 | 1 Laporan | 349,105,860 |
| ³ Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi > 2,900 | >2.900 | 2.600 | 331,068,000 | 2.700 | 364,174,800 | 2.800 | 400,592,280 | 2.850 | 440,651,508 | 2.900 | 484,716,659 | 2.900 | 484,716,659 |
| Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah | Jumlah kerjasama yang difasilitasi | 9 | 9 | 153,999,000 | 9 | 169,398,900 | 36 | 186,338,790 | 45 | 204,972,669 | 54 | 225,469,936 | 54 | 225,469,936 |
| ¹ Sub Kegiatan Fasilitas Kerjasama Antar Pemerintah | Jumlah Jumlah bahan perumusan kebijakan untuk forum-forum kerjasama yang difasilitasi, tersusunnya data potensi daerah dalam rangka Kerjasama Luar Negeri skala provinsi, Jumlah ijin ASN Pemerintah Provinsi dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD ke Luar Negeri yang difasilitasi | 5 Naskah | 5 Naskah | 153,999,000 | 5 Naskah | 169,398,900 | 6 Naskah | 186,338,790 | 6 Naskah | 204,972,669 | 7 Naskah | 225,469,936 | 7 Naskah | 225,469,936 |
| ² Sub Kegiatan Fasilitas Kerjasama Badan Usaha/Swasta | Jumlah Jumlah bahan perumusan kebijakan untuk forum-forum kerjasama dengan badan usaha yang difasilitasi | 9 Kali | 9 Kali | 88,005,000 | 9 Kali | 96,805,500 | 10 Kali | 106,486,050 | 10 Kali | 117,134,655 | 10 Kali | 128,848,121 | 10 Kali | 128,848,121 |
| ³ Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Jumlah dokumen evaluasi, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kerjasama anta pemerintah, badan usaha dan swasta | 3 Laporan | 3 Laporan | 87,989,400 | 3 Laporan | 96,788,340 | 3 Laporan | 106,467,174 | 3 Laporan | 117,113,891 | 3 Laporan | 128,825,281 | 3 Laporan | 128,825,281 |
| | | | | 2,321,757,000 | | 2,553,932,700 | | 2,809,325,970 | | 3,090,258,567 | | 3,399,284,424 | | 3,399,284,424 |

Biro
Pemerintahan dan
Otda Setda
Provinsi Jambi

2. BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program serta Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal (2020) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjababan | Lokasi |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--|----------------|---|-------------|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 4.01 | Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Nilai SKIP | 54,54 | 65 | 539,534,783 | 65 | 593,479,997 | 65 | 652,827,997 | 65 | 718,110,797 | 65 | 789,921,876 | 65 | 868,914,064 | 65 | 868,914,064 | Biro Kesra Setda Prov. Jambi | Prov. Jambi |
| 4.01.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Biro | - | 7 Dokumen/ Laporan | 409,097,440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Biro Kesra Setda Prov. Jambi | Prov. Jambi |
| 4.01.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA/DPA Lingkup Biro | - | 3 Dokumen | 359,743,560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Biro Kesra Setda Prov. Jambi | Prov. Jambi |
| 4.01.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Realisasi Capaian dan Realisasi kinerja Biro | - | 1 Laporan | 25,027,440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Biro Kesra Setda Prov. Jambi | Prov. Jambi |
| 4.01.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen LKJ, LKPJ dan LPPD Lingkup Biro | - | 3 Dokumen | 24,326,440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Biro Kesra Setda Prov. Jambi | Prov. Jambi |
| 4.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran | 3 Bagian | 3 Bagian | 110,121,316 | 100% | 571,132,368 | 100% | 628,245,604 | 100% | 691,070,165 | 100% | 760,177,181 | 100% | 836,194,899 | 100% | 836,194,899 | Biro Kesra Setda Prov. Jambi | Prov. Jambi |
| 4.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Jenis Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 3 Bagian | 3 Bagian | 59,628,066 | 40 Jenis | 65,590,873 | 40 Jenis | 72,149,960 | 40 Jenis | 79,364,956 | 40 Jenis | 87,301,451 | 40 Jenis | 96,031,597 | 40 Jenis | 96,031,597 | Biro Kesra Setda Prov. Jambi | Prov. Jambi |
| 4.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan | Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan | 3 Bagian | 3 Bagian | 50,493,250 | 4 Jenis | 55,542,575 | 4 Jenis | 61,096,833 | 4 Jenis | 67,206,516 | 4 Jenis | 73,927,167 | 4 Jenis | 81,319,884 | 4 Jenis | 81,319,884 | Biro Kesra Setda Prov. Jambi | Prov. Jambi |
| 4.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan | - | - | - | 2 Kali | 416,734,920 | 2 Kali | 458,408,412 | 2 Kali | 504,249,253 | 2 Kali | 554,674,179 | 2 Kali | 610,141,596 | 2 Kali | 610,141,596 | Biro Kesra Setda Prov. Jambi | Prov. Jambi |
| 4.01.01.1.06.04 | Penyediaan Logistik Kantor | Jumlah Peserta Rapat/tamu/dil | - | - | - | 480 Peserta | 33,264,000 | 480 Peserta | 36,590,400 | 480 Peserta | 40,249,440 | 480 Peserta | 44,274,384 | 480 Peserta | 48,701,822 | 480 Peserta | 48,701,822 | Biro Kesra Setda Prov. Jambi | Prov. Jambi |
| 4.01.01.1.08 | Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 3 Bagian | 3 Bagian | 20,316,027 | 100% | 22,347,630 | 100% | 24,582,393 | 100% | 27,040,632 | 100% | 29,744,695 | 100% | 32,719,165 | 100% | 32,719,165 | Biro Kesra Setda Prov. Jambi | Prov. Jambi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 4.01.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Surat | 3 Bagian | 3 Bagian | 20,316,027 | 822 Surat | 22,347,630 | 822 Surat | 24,582,393 | 822 Surat | 27,040,632 | 822 Surat | 29,744,695 | 822 Surat | 32,719,165 | 3 Bagian | 32,719,165 | Biro Kesra Setda Prov. Jambi | Prov. Jambi |
| 4.01.04 | Program Kesejahteraan Rakyat | Persentase rekomendasi Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan | 100% | 100% | 63,725,474,035 | 100% | 64,727,861,147 | 100% | 68,030,486,971 | 100% | 71,663,375,376 | 100% | 75,659,552,623 | 100% | 80,055,347,595 | 100% | 80,055,347,595 | Biro Kesra Setda Prov. Jambi | Prov. Jambi |
| 4.01.04.1.01 | Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual | Jumlah Rekomendasi | 6 Rekomendasi | 6 Rekomendasi | 58,865,421,515 | 11 Rekomenda si | 61,581,803,375 | 11 Rekomenda si | 64,569,823,422 | 11 Rekomenda si | 67,856,645,472 | 11 Rekomend asi | 71,472,149,729 | 11 Rekomend asi | 75,449,204,411 | 11 Rekomend asi | 75,449,204,411 | Biro Kesra Setda Prov. Jambi | Prov. Jambi |
| 4.01.04.1.01.01 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Jumlah Draft Rekomendasi | 3 Draft Rekomendasi | 3 Draft Rekomend asi | 34,131,023,412 | 6 Draft Rekomendasi | 35,639,783,554 | 6 Draft Rekomendasi | 36,033,601,618 | 6 Draft Rekomendasi | 36,466,801,489 | 6 Draft Rekomenda si | 36,943,321,347 | 6 Draft Rekomenda sii | 37,467,493,191 | 6 Draft Rekomend asi | 37,467,493,191 | Biro Kesra Setda Prov. Jambi | Prov. Jambi |
| 4.01.04.1.01.02 | Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | Jumlah Draft Rekomendasi | 3 Draft Rekomendasi | 3 Draft Rekomend asi | 24,734,398,103 | 5 Draft Rekomendasi | 25,942,019,821 | 5 Draft Rekomendasi | 28,536,221,803 | 5 Draft Rekomendasi | 31,389,843,984 | 5 Draft Rekomenda si | 34,528,828,382 | 5 Draft Rekomenda si | 37,981,711,220 | 5 Draft Rekomend asi | 37,981,711,220 | Biro Kesra Setda Prov. Jambi | Prov. Jambi |
| 4.01.04.1.02 | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | Jumlah Rekomendasi | 10 Rekomendasi | 10 Rekomend asi | 1,971,387,060 | 13 Rekomenda si | 2,168,525,766 | 13 Rekomenda si | 2,385,378,343 | 13 Rekomenda si | 2,623,916,177 | 13 Rekomend asi | 2,886,307,795 | 13 Rekomend asi | 3,174,938,574 | 13 Rekomend asi | 3,174,938,574 | Biro Kesra Setda Prov. Jambi | Prov. Jambi |
| 4.01.04.1.02.01 | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | Jumlah Draft Rekomendasi | 1 Draft Rekomendasi | 1 Draft Rekomend asi | 248,239,140 | 3 Draft Rekomendasi | 273,063,054 | 3 Draft Rekomendasi | 300,369,359 | 3 Draft Rekomendasi | 330,406,295 | 3 Draft Rekomenda si | 363,446,925 | 3 Draft Rekomenda si | 399,791,617 | 3 Draft Rekomend asi | 399,791,617 | Biro Kesra Setda Prov. Jambi | Prov. Jambi |
| 4.01.04.1.02.02 | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan | Jumlah Draft Rekomendasi | 4 Draft Rekomendasi | 4 Draft Rekomend asi | 559,981,300 | 5 Draft Rekomendasi | 615,979,430 | 5 Draft Rekomendasi | 677,577,373 | 5 Draft Rekomendasi | 745,335,110 | 5 Draft Rekomenda si | 819,868,621 | 5 Draft Rekomenda si | 901,855,483 | 5 Draft Rekomend asi | 901,855,483 | Biro Kesra Setda Prov. Jambi | Prov. Jambi |
| 4.01.04.1.02.03 | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial | Jumlah Draft Rekomendasi | 5 Draft Rekomendasi | 5 Draft Rekomend asi | 1,163,166,620 | 5 Draft Rekomendasi | 1,279,483,282 | 5 Draft Rekomendasi | 1,407,431,610 | 5 Draft Rekomendasi | 1,548,174,771 | 5 Draft Rekomenda sii | 1,702,992,248 | 5 Draft Rekomenda si | 1,873,291,473 | 5 Draft Rekomend asi | 1,873,291,473 | | Prov. Jambi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------------------|-------------|
| 4.01.04.1.03 | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | Jumlah Rekomendasi | 8 Rekomendasi | 8 Rekomendasi | 2,888,665,460 | 11 Rekomendasi | 977,532,006 | 11 Rekomendasi | 1,075,285,207 | 11 Rekomendasi | 1,182,813,727 | 11 Rekomendasi | 1,301,095,100 | 11 Rekomendasi | 1,431,204,610 | 11 Rekomendasi | 1,431,204,610 | Biro Kesra Setda Prov. Jambi | Prov. Jambi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 4.01.04.1.03.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata | Jumlah Draft Rekomendasi | 1 Draft Rekomendasi | 1 Draft Rekomendasi | 2,192,898,560 | 3 Draft Rekomendasi | 272,188,416 | 3 Draft Rekomendasi | 293,407,258 | 3 Draft Rekomendasi | 316,747,983 | 3 Draft Rekomendasi | 342,422,782 | 3 Draft Rekomendasi | 370,665,060 | 3 Draft Rekomendasi | 370,665,060 | Biro Kesra Setda Prov. Jambi | Prov. Jambi |
| 4.01.04.1.03.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | Jumlah Draft Rekomendasi | 6 Draft Rekomendasi | 6 Draft Rekomendasi | 555,754,440 | 5 Draft Rekomendasi | 491,329,884 | 5 Draft Rekomendasi | 546,885,706 | 5 Draft Rekomendasi | 619,709,160 | 5 Draft Rekomendasi | 693,680,076 | 5 Draft Rekomendasi | 775,048,083 | 5 Draft Rekomendasi | 775,048,083 | Biro Kesra Setda Prov. Jambi | Prov. Jambi |
| 4.01.04.1.03.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan | Jumlah Draft Rekomendasi | 1 Draft Rekomendasi | 1 Draft Rekomendasi | 140,012,460 | 3 Draft Rekomendasi | 214,013,706 | 3 Draft Rekomendasi | 234,992,243 | 3 Draft Rekomendasi | 246,356,584 | 3 Draft Rekomendasi | 264,992,243 | 3 Draft Rekomendasi | 285,491,467 | 3 Draft Rekomendasi | 285,491,467 | Biro Kesra Setda Prov. Jambi | Prov. Jambi |

Jambi, Agustus 2021
 Plt. KEPALA BIRO KESRA

2. Biro Hukum Setda Provinsi Jambi

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator sasaran | Kode Rekening | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kinerja Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021 s.d. 2026) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra | Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab | Lokasi | | |
|---|---|---|--|--|---|---|---|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|------------|------------|-----|
| | | | | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | | | | Tahun 2026 | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | Target | Rp. |
| Meningkatnya penataan produk hukum dan penyelesaian masalah hukum | Meningkatnya Harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan masyarakat | Persentase Produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | persentase Produk hukum Provinsi yang tidak bertentangan dg produk hukum yang lebih tinggi | 100% (3200 Produk Hukum Daerah) | 100% (650 Produk Hukum Daerah) | 2,169,287,860 | 100% (650 Produk Hukum Daerah) | 2,610,000,000 | 100% (650 Produk Hukum Daerah) | 2,871,000,000 | 100% (650 Produk Hukum Daerah) | 3,158,100,000 | 100% (650 Produk Hukum Daerah) | 3,473,910,000 | 100% (650 Produk Hukum Daerah) | 4,114,121,000 | 100% (3900 Produk Hukum Daerah) | Biro Hukum | | | |
| | | | | Persentase Penyelesaian masalah hukum | 80% (130 Permasalahan Hukum) | 80% (15 Permasalahan an Hukum) | 80% (130 Permasalahan an Hukum) | 80% (130 Permasalahan n Hukum) | 95% (130 Permasalahan n Hukum) | 90% (130 Permasalahan n Hukum) | 90% (130 Permasalahan an Hukum) | 85% (130 Permasalahan Hukum) | | | | | | | | | | |
| | | | | Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan | Jumlah produk hukum daerah yang difasilitasi | 3200 Produk Hukum Daerah | 650 Produk Hukum Daerah | 1,132,033,700 | 650 Produk Hukum Daerah | 1,240,000,000 | 650 Produk Hukum Daerah | 1,364,000,000 | 650 Produk Hukum Daerah | 1,500,400,000 | 650 Produk Hukum Daerah | 1,650,440,000 | 650 Produk Hukum Daerah | 1,815,484,000 | 650 Produk Hukum Daerah | Biro Hukum | | |
| | | | | Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan | Jumlah Produk Hukum pengaturan yang disusun | 300 Produk Hukum Pengaturan | 60 Produk Hukum Pengaturan | 319,999,900 | 60 Produk Hukum Pengaturan | 320,000,000 | 60 Produk Hukum Pengaturan | 352,000,000 | 60 Produk Hukum Pengaturan | 387,200,000 | 60 Produk Hukum Pengaturan | 425,920,000 | 60 Produk Hukum Pengaturan | 468,512,000 | 360 Produk Hukum Pengaturan | Biro Hukum | | |
| | | | | Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan | Jumlah Produk Hukum penetapan yang ditetapkan | 2500 SK (Produk Hukum Pengaturan) | 500 SK (Produk Hukum Pengaturan) | 179,999,900 | 500 SK (Produk Hukum Pengaturan) | 200,000,000 | 500 SK (Produk Hukum Pengaturan) | 220,000,000 | 500 SK (Produk Hukum Pengaturan) | 242,000,000 | 500 SK (Produk Hukum Pengaturan) | 266,200,000 | 500 SK (Produk Hukum Pengaturan) | 292,820,000 | 3000 SK (Produk Hukum Pengaturan) | Biro Hukum | | |
| | | | | Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum lainnya | Jumlah produk hukum dan naskah hukum yang terdokumentasi | 2800 Produk Hukum Provinsi | 700 Produk Hukum Provinsi | 242,000,000 | 700 Produk Hukum Provinsi | 300,000,000 | 700 Produk Hukum Provinsi | 330,000,000 | 700 Produk Hukum Provinsi | 363,000,000 | 700 Produk Hukum Provinsi | 399,300,000 | 700 Produk Hukum Provinsi | 439,230,000 | 4200 Produk Hukum Provinsi | Biro Hukum | | |
| | | | | Sub Kegiatan Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota | Jumlah produk hukum kab/kota yang difasilitasi dan dievaluasi | 400 Produk Hukum Kabupaten/Kota | 90 Produk Hukum Kabupaten/ Kota | 390,033,900 | 90 Produk Hukum Kabupaten/ Kota | 420,000,000 | 90 Produk Hukum Kabupaten/ Kota | 462,000,000 | 90 Produk Hukum Kabupaten/ Kota | 508,200,000 | 90 Produk Hukum Kabupaten/ Kota | 559,020,000 | 90 Produk Hukum Kabupaten/ Kota | 614,922,000 | 540 Produk Hukum Kabupaten/ Kota | Biro Hukum | | |
| | | | Persentase Penyelesaian permasalahan hukum dan HAM | Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum | Jumlah Permasalahan hukum dan HAM Provinsi Jambi yang difasilitasi | 80 Permasalahan hukum | 15 Permasalahan an hukum | 689,999,950 | 15 Permasalahan an hukum | 830,000,000 | 15 Permasalahan a hukum | 913,000,000 | 15 Permasalahan n hukum | 1,004,300,000 | 15 Permasalahan a hukum | 1,104,730,000 | 15 Permasalahan an hukum | 1,215,203,000 | 90 Permasalahan hukum | Biro Hukum | | |
| | | | | Sub Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum | Jumlah Penyelesaian permasalahan hukum Litigasi yang difasilitasi | 30 Perkara | 5 Perkara | 446,999,950 | 5 Perkara | 550,000,000 | 5 Perkara | 605,000,000 | 5 Perkara | 665,500,000 | 5 Perkara | 732,050,000 | 5 Perkara | 805,255,000 | 30 Perkara | Biro Hukum | | |
| | | | | Sub Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM | Jumlah telaahan permasalahan hukum secara non litigasi yang difasilitasi | 50 Telaahan | 10 Telaahan | 243,000,000 | 10 Telaahan | 280,000,000 | 10 Telaahan | 308,000,000 | 10 Telaahan | 338,800,000 | 10 Telaahan | 372,680,000 | 10 Telaahan | 409,948,000 | 60 Telaahan | Biro Hukum | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Kab/Kota Peduli HAM | 11 Laporan | 11 Laporan | | 11 Laporan | - | 11 Laporan | - | 11 Laporan | - | 11 Laporan | - | 11 Laporan | - | 66 Laporan | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Aksi HAM Provinsi Jambi | 5 Dokumen | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | - | 1 Dokumen | - | 1 Dokumen | - | 1 Dokumen | - | 1 Dokumen | - | 6 Dokumen | | | |
| | | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai SAKIP | BB | BB | 347,254,210 | BB | 441,966,460 | BB | 442,000,000 | BB | 443,650,000 | BB | 445,465,000 | BB | 447,461,500 | BB | Biro Hukum | |
| | | | | | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun | 100% | 100% | 14,470,000 | 100% | 40,000,000 | 100% | 18500000 | 100% | 18500000 | 100% | 18500000 | 100% | Biro Hukum | | | |
| | | | | | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah | Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan Biro Hukum dalam Dokumen Perencanaan yang disusun | 4 Dokumen | 2 Dokumen | 7,950,000 | 2 Dokumen | 10,000,000 | 2 Dokumen | 11,000,000 | 2 Dokumen | 12,100,000 | 2 Dokumen | 13,310,000 | 2 Dokumen | 14,641,000 | 12 Dokumen | Biro Hukum | |
| | | | | | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA Biro Hukum yang disusun | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 5,000,000 | 1 Dokumen | 5,500,000 | 1 Dokumen | 6,050,000 | 1 Dokumen | 6,655,000 | 1 Dokumen | 7,320,500 | 6 Dokumen | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|-------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--|
| | | | | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA Perubahan Biro Hukum disusun | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 5,000,000 | 1 Dokumen | 5,500,000 | 1 Dokumen | 6,050,000 | 1 Dokumen | 6,655,000 | 1 Dokumen | 7,320,500 | 6 Dokumen | | |
| | | | | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA Biro Hukum disusun | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 5,000,000 | 1 Dokumen | 5,500,000 | 1 Dokumen | 6,050,000 | 1 Dokumen | 6,655,000 | 1 Dokumen | 7,320,500 | 6 Dokumen | | |
| | | | | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA Perubahan Biro Hukum disusun | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 5,000,000 | 1 Dokumen | 5,500,000 | 1 Dokumen | 6,050,000 | 1 Dokumen | 6,655,000 | 1 Dokumen | 7,320,500 | 6 Dokumen | | |
| | | | | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan realisasi Capaian dan realisasi Kinerja Biro Hukum | 5 Dokumen | 2 Dokumen | 6,520,000 | 2 Dokumen | 10,000,000 | 2 Dokumen | 11,000,000 | 2 Dokumen | 12,100,000 | 2 Dokumen | 13,310,000 | 2 Dokumen | 14,641,000 | 12 Dokumen | Biro Hukum | |
| | | | | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang-undangan | 100% | 100% | 76,698,000 | 100% | 140,000,000 | 100% | 86,000,000 | 100% | 86,000,000 | 100% | 86,000,000 | 100% | 86,000,000 | 100% | Biro Hukum | |
| | | | | Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang disosialisasikan | 4 puu | 1 puu | 22,000,000 | 2 puu | 80,000,000 | 2 puu | 88,000,000 | 2 puu | 96,800,000 | 2 puu | 106,480,000 | 2 puu | 117,128,000 | 11 puu | Biro Hukum | |
| | | | | Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 1 kali | 1 kali | 54,698,000 | 1 kali | 60,000,000 | 1 kali | 66,000,000 | 1 kali | 72,600,000 | 1 kali | 79,860,000 | 1 kali | 87,846,000 | 6 kali | Biro Hukum | |
| | | | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi perkantoran yang terpenuhi | 100% | 100% | 246,966,460 | 100% | 246,966,460 | 100% | 321000000 | 100% | 321000000 | 100% | 321000000 | 100% | 321000000 | 100% | Biro Hukum | |
| | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Alat Tulis Kantor yang tersedia | 100% | 100% | 83,045,460 | 100% | 100,000,000 | 100% | 110,000,000 | 100% | 121,000,000 | 100% | 133,100,000 | 100% | 146,410,000 | 100% | Biro Hukum | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------|--|
| | | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Persentase barang cetakan dan penggandaan | 100% | | | | 20,000,000 | | 22,000,000 | | 24,200,000 | | 26,620,000 | | 29,282,000 | 100% | | |
| | | | | | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan | 100% | 100% | 163,921,000 | 100% | 200,000,000 | 100% | 220,000,000 | 100% | 242,000,000 | 100% | 266,200,000 | 100% | 292,820,000 | 100% | Biro Hukum | |
| | | | | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 9,119,750 | 100% | 15,000,000 | 100% | 16,500,000 | 100% | 18,150,000 | 100% | 19,965,000 | 100% | 21,961,500 | 100% | Biro Hukum | |
| | | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Surat pertahun | 15000 Surat | 3000 | 9,119,750 | 3000 | 15,000,000 | 3000 | 16,500,000 | 3000 | 18,150,000 | 3000 | 19,965,000 | 3000 | 21,961,500 | 18000 Surat | Biro Hukum | |

3. BIRO PEREKONOMIAN

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM SERTA KEGIATAN | | | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|--|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--|-------------|--|--------|
| PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PROGRAM | KEGIATAN | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | | |
| | | | | | | TARGET | (Rp) | TARGET | (Rp) | TARGET | (Rp) | TARGET | (Rp) | TARGET | (Rp) | TARGET | (Rp) | | |
| 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Penunjang Pemerintahan Provinsi | Urusan Daerah | | | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Predikat AKIP Biro | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyusunan Dokumentasi Percanaan Perangkat Daerah | | Laporan capaian perencanaan | | 10 Lap | 52,403,000 | 10 Lap | 43,599,000 | 10 Lap | 54,498,750 | 10 Lap | 68,123,438 | 10 Lap | 85,154,297 | 10 Lap | 106,442,871 | Biro Perekonomian | Jambi |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar | | Laporan capaian kinerja dan iktisar | | 10 Lap | 19,150,000 | 10 Lap | 19,875,000 | 10 Lap | 24,843,750 | 10 Lap | 31,054,688 | 10 Lap | 38,818,359 | 10 Lap | 48,522,949 | Biro Perekonomian | Jambi |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Laporan capaian kinerja | | 10 Lap | 7,929,250 | 10 Lap | 8,727,033 | 10 Lap | 10,908,791 | 10 Lap | 13,635,989 | 10 Lap | 17,044,986 | 10 Lap | 21,306,233 | Biro Perekonomian | Jambi |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | persentase terpenuhnya layanan administrasi perkantoran | | | | | | | | | | | | | | Biro Perekonomian | |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Jumlah rapat /koordinasi konsultasi yang dilaksanakan | | 100% | 226,711,000 | 100% | 217,150,700 | 100% | 271,438,375 | 100% | 339,297,969 | 100% | 424,122,461 | 100% | 530,153,076 | Biro Perekonomian | Jambi |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | persentase percepatan pelayanan administrasi perkantoran | | | | | | | | | | | | | | Biro Perekonomian | |
| | | Penyediaan Logistik Kantor | | persentase penyediaan logistik yang di fasilitasi | | 100% | 38,030,000 | 100% | 20,360,000 | 100% | 25,450,000 | 100% | 31,812,500 | 100% | 39,765,625 | 100% | 49,707,031 | Biro Perekonomian | Jambi |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan pengadaan | | jumlah barang cetakan dan pengadaan | | 100% | 25,973,860 | 100% | 25,248,560 | 100% | 31,560,700 | 100% | 39,450,875 | 100% | 49,313,594 | 100% | 61,641,992 | Biro Perekonomian | Jambi |
| | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | persentase penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | | 100% | 58,042,740 | 100% | 61,865,200 | 100% | 77,331,500 | 100% | 96,664,375 | 100% | 120,830,469 | 100% | 151,038,086 | Biro Perekonomian | Jambi |
| Perekonomian dan Pembangunan | | | | Persentase fasilitasi kebijakan Perekonomian dan Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | Biro Perekonomian | Jambi |
| | Pengelola Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian | | | Persentase fasilitasi, koordinasi dan evaluasi kebijakan masalah perekonomian | | | | | | | | | | | | | | Biro Perekonomian | |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Kabijakan Ekonomi Makro | | Jumlah Kebijakan Ekonomi Makro di Provinsi Jambi | | 30 Dok | 126,980,000 | 30 Dok | 117,480,000 | 30 Dok | 146,850,000 | 30 Dok | 183,562,500 | 30 Dok | 229,453,125 | 30 Dok | 286,816,406 | Biro Perekonomian | Jambi |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro | | Jumlah Kebijakan Ekonomi Mikro di Provinsi Jambi | | 25 Dok | 168,780,000 | 25 Dok | 92,400,000 | 25 Dok | 115,500,000 | 25 Dok | 144,375,000 | 25 Dok | 180,468,750 | 25 Dok | 225,585,938 | Biro Perekonomian | Jambi |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM SERTA KEGIATAN | | | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA TAHUN AKHIR PERIODE RENCANAAN PENSTRATEGIS PERANGKAT | | UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|--|---|--|---|--|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------|---|-------------------|--|--------|
| PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PROGRAM | KEGIATAN | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TARGET | (Rp) | | | |
| | | | | | | TARGET | (Rp) | TARGET | (Rp) | TARGET | (Rp) | TARGET | (Rp) | TARGET | (Rp) | | | | | |
| 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | Pengelola kebijakan koordinasi SDA | | | Persentase fasilitasi koordinasi dan evaluasi kebijakan masalah SDA | | | | | | | | | | | | | | Biro Perekonomian | | |
| | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan | | Jumlah Kebijakan Bidang Pertanian, Kehutanan,Kelautan dan Perikanan | | 30 Dok | 142,692,700 | 30 Dok | 137,692,700 | 30 Dok | 172,115,875 | 30 Dok | 215,144,844 | 30 Dok | 268,931,055 | 30 Dok | 336,163,818 | Biro Perekonomian | Jambi | |
| | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | | Jumlah Kebijakan Bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup | | 20 Dok | 146,066,750 | 20 Dok | 91,300,000 | 20 Dok | 114,125,000 | 20 Dok | 142,656,250 | 20 Dok | 178,320,313 | 20 Dok | 222,900,391 | Biro Perekonomian | Jambi | |
| | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | | Jumlah Kebijakan Enargi dan Air | | 25 Dok | 110,800,000 | 25 Dok | 92,300,000 | 25 Dok | 115,375,000 | 25 Dok | 144,218,750 | 25 Dok | 180,273,438 | 25 Dok | 225,341,797 | Biro Perekonomian | Jambi | |
| | Pengelolaan Kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD | | | Persentase fasilitasi koordinasi dan evaluasi kebijakan masalah BUMD dan BLUD | | | | | | | | | | | | | | Biro Perekonomian | | |
| | | Koordinasi,Singronisasi,Mo nitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | | Laporan Evaluasi BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | | 35 Dok | 155,840,000 | 35 Dok | 181,737,700 | 35 Dok | 227,172,125 | 35 Dok | 283,965,156 | 35 Dok | 354,956,445 | 35 Dok | 443,695,557 | Biro Perekonomian | Jambi | |
| | | Koordinasi,Singronisasi,Mo nitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum,limbah dan Sanitasi | | Jumlah Kebijakan Bidang BUMD Air minum, Limbah dan Sanitasi | | 35 Dok | 426,800,590 | 35 Dok | 90,800,000 | 35 Dok | 113,500,000 | 35 Dok | 141,875,000 | 35 Dok | 177,343,750 | 35 Dok | 221,679,688 | Biro Perekonomian | Jambi | |
| | | Koordinasi,Singronisasi,Mo nitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah | | Jumlah Laporan Evaluasi BLUD | | 25 Dok | 110,800,000 | 25 Dok | 91,300,000 | 25 Dok | 114,125,000 | 25 Dok | 142,656,250 | 25 Dok | 178,320,313 | 25 Dok | 222,900,391 | Biro Perekonomian | Jambi | |

5. BIRO PENGELOLAAN BARANG DAN JASA

Rp (Dalam 000.000)

| Rencana Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Kondisi Awal (2020) | Target | | | | | | | | | | | | Ket |
|---|---|---------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----|
| | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | Rp (Juta) | Kinerja | Rp (Juta) | Kinerja | Rp (Juta) | Kinerja | Rp (Juta) | Kinerja | Rp (Juta) | Kinerja | Rp (Juta) | Kinerja | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | - | 2,359.99 | | 2,928.47 | | 3,514.16 | | 4,216.99 | | 4,849.54 | | 5,576.97 | | |
| Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | - | 1,759.99 | | 2,287.98 | | 2,745.58 | | 3,294.70 | | 3,788.90 | | 4,357.24 | | |
| Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tercapainya Rakor dan konsultasi ke luar daerah | - | 1,759.99 | 1 Tahun | 2,287.98 | 1 Tahun | 2,745.58 | 1 Tahun | 3,294.70 | 1 Tahun | 3,788.90 | 1 Tahun | 4,357.24 | 1 Tahun | |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | - | 600.00 | | 640.48 | | 768.58 | | 922.30 | | 1,060.64 | | 1,219.74 | | |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tercapainya penataan adm umum dan jasa surat menyurat | - | 600.00 | 1 Tahun | 640.48 | 1 Tahun | 768.58 | 1 Tahun | 922.30 | 1 Tahun | 1,060.64 | 1 Tahun | 1,219.74 | 1 Tahun | |
| PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | | - | 1,550.00 | | 5,155.12 | | 6,190.02 | | 7,428.02 | | 8,542.22 | | 9,823.56 | | |
| Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | - | 929.70 | | 2,663.24 | | 3,195.89 | | 3,795.56 | | 4,364.89 | | 5,019.63 | | |
| Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah inventarisasi paket pengadaan, jumlah riset dan analisis pasar | - | 94.27 | 100% | 331.89 | 100% | 398.27 | 100% | 477.92 | 100% | 549.61 | 100% | 632.05 | 100% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--|
| Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah paket pengadaan yang dilaks. tepat waktu | - | 162.00 | 300 Paket | 1,657.92 | 300 Paket | 1,989.50 | 325 Paket | 2,387.40 | 350 Paket | 2,745.52 | 375 Paket | 3,157.34 | 400 Paket | |
| Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa | Periode pemantauan dan evaluasi PBJ | - | 673.43 | 83% | 673.43 | 85% | 808.12 | 88% | 930.23 | 90% | 1,069.77 | 93% | 1,230.23 | 95% | |
| Kegiatan Pengelolaan Layanan | | - | 369.99 | | 1,425.13 | | 1,710.16 | | 2,052.19 | | 2,360.02 | | 2,714.02 | | |
| Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik | Periode pengelolaan SPSE | - | 127.91 | 78% | 582.71 | 80% | 699.25 | 85% | 839.10 | 88% | 964.97 | 90% | 1,109.71 | 95% | |
| Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | Periode pengembangan sistem informasi PBJ | - | 129.45 | 78% | 482.71 | 80% | 579.25 | 85% | 695.10 | 88% | 799.37 | 90% | 919.27 | 95% | |
| Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi PBJ | Periode pengelolaan informasi PBJ | - | 112.62 | 88% | 359.71 | 90% | 431.65 | 90% | 517.98 | 90% | 595.68 | 95% | 685.03 | 100% | |
| Kegiatan Pembinaan dan Advokasi PBJ | | - | 250.31 | | 1,066.75 | | 1,283.97 | | 1,580.27 | | 1,817.32 | | 2,089.91 | | |
| Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan PBJ | Jumlah Kelembagaan PBJ yang dibina | - | 142.45 | 11 Kab/Kota | 309.24 | 43 Org, Kab/Kota | 371.09 | 43 Org, Kab/Kota | 445.31 | 43 Org, Kab/Kota | 512.10 | 43 Org, Kab/Kota | 588.92 | 43 Org, Kab/Kota | |
| Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah pendampingan/ konsultasi terkait PBJ dan jumlah peserta bimtek | - | 107.86 | 160 Org Pendamping | 357.51 | 300 Org Pendamping | 429.01 | 350 Org Pendamping | 514.81 | 375 Org Pendamping | 592.04 | 400 Org Pendamping | 680.84 | 425 Org Pendamping | |
| Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia | Jumlah peningkatan kompetensi SDM UKPBJ | - | | | 400.00 | 160 | 483.87 | 200 | 620.15 | 225 | 713.18 | 250 | 820.15 | 300 | |
| | JUMLAH | - | 3,909.99 | | 8,083.59 | | 9,704.18 | | 11,645.01 | | 13,391.77 | | 15,400.53 | | |

6. Biro Administrasi Pembangunan

| kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program serta Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung Jawab | Lokasi |
|-----------------|---|--|---|--|-------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|---------------|--|--------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4.01.01 | Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi | Persentase Ketercapaian Program Penunjang | 100% | 100% | 595,999,636 | 100% | 655,599,600 | 100% | 721,159,560 | 100% | 793,275,516 | 100% | 872,603,067 | 100% | 872,603,067 | Bio Adminitrasi Pembangunan | Provinsi Jambi |
| 4.01.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | NILAI SAKIP | 5067% | 60.5 | 92,105,560 | 61.0 | 101,316,116 | 62.0 | 111,447,728 | 62.5 | 122,592,500 | 63.5 | 134,851,750 | 63.5 | 134,851,750 | Bio Adminitrasi Pembangunan | Provinsi Jambi |
| 4.01.01.1.01.01 | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah dokumen perencanaan yang di susun | 2 dokumen, 12 bulan periode pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi | 2 dok Renja | 25,530,600 | 2 dok Renja | 28,083,660.0 | 2 dok Renja | 30,892,026.0 | 2 dok Renja | 33,981,228.6 | 2 dok Renja | 37,379,351.5 | 2 dok Renja | 37,379,351.5 | Bio Adminitrasi Pembangunan | Provinsi Jambi |
| | | | | 1 dok Renstra | | 0 dok Renstra | | 0 dok Renstra | | 0 dok Renstra | | 1 dok Renstra | | | | | |
| | | | | 12 bulan periode pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi | | 12 bulan periode pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi | | 12 bulan periode pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi | | 12 bulan periode pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi | | 12 bulan periode pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi | | | | | |
| 4.01.01.1.01.04 | Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD | Jumlah DPA yang di susun | 2 DPA | 2 DPA | 10,660,000 | 2 DPA | 11,726,000.0 | 2 DPA | 12,898,600.0 | 2 DPA | 14,188,460.0 | 2 DPA | 15,607,306.0 | 2 DPA | 15,607,306 | Bio Adminitrasi Pembangunan | Provinsi Jambi |
| 4.01.01.1.01.06 | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Laporan Krealisasi Capaian dan realisasi Kinerja Biro | 12 laporan realisasi capaian kinerja | 12 laporan realisasi capaian kinerja | 24,999,960 | 12 laporan realisasi capaian kinerja | 27,499,956.0 | 12 laporan realisasi capaian kinerja | 30,249,951.6 | 12 laporan realisasi capaian kinerja | 33,274,946.8 | 12 laporan realisasi capaian kinerja | 36,602,441.4 | 12 laporan realisasi capaian kinerja | 36,602,441 | Bio Adminitrasi Pembangunan | Provinsi Jambi |
| 4.01.01.1.01.07 | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah laporan Kinerja SKPD (LKj, LKPJ, LPPD dan Laporan evaluasi | 4 Laporan | 4 Laporan | 30,915,000 | 4 Laporan | 34,006,500.0 | 4 Laporan | 37,407,150.0 | 4 Laporan | 41,147,865.0 | 4 Laporan | 45,262,651.5 | 4 Laporan | 45,262,652 | Bio Adminitrasi Pembangunan | Provinsi Jambi |
| 4.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi kantor yang difasilitasi | 100% | 100% | 465,676,076 | 100% | 512,243,684 | 100% | 563,468,052 | 100% | 619,814,857 | 100% | 681,796,343 | 100% | 681,796,343 | Bio Adminitrasi Pembangunan | Provinsi Jambi |
| 4.01.01.1.06.02 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 20 Jenis | 20 jenis | 70,990,187 | 20 jenis | 78,089,205.7 | 20 jenis | 85,898,126.3 | 20 jenis | 94,487,938.9 | 20 jenis | 103,936,732.8 | 20 jenis | 103,936,733 | Bio Adminitrasi Pembangunan | Provinsi Jambi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|-----------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------------------------|----------------|
| 4.01.01.1.06.04 | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan | 0 | 200 kotak | 9,885,000 | 200 kotak | 10,873,500.0 | 200 kotak | 11,960,850.0 | 200 kotak | 13,156,935.0 | 200 kotak | 14,472,628.5 | 200 kotak | 14,472,629 | Bio Adminitrasi Pembangunan | Provinsi Jambi |
| 4.01.01.1.06.05 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah/jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 7 jenis | 7 jenis | 39,999,890 | 7 jenis | 43,999,879.0 | 7 jenis | 48,399,866.9 | 7 jenis | 53,239,853.6 | 7 jenis | 58,563,838.9 | 7 jenis | 58,563,839 | Bio Adminitrasi Pembangunan | Provinsi Jambi |
| 4.01.01.1.06.06 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan kantor yang disediakan | 0 | 30 buku | 9,801,000 | 30 buku | 10,781,100.0 | 30 buku | 11,859,210.0 | 30 buku | 13,045,131.0 | 30 buku | 14,349,644.1 | 30 buku | 14,349,644 | Bio Adminitrasi Pembangunan | Provinsi Jambi |
| 4.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | jumlah pelaksanaan rapat Koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi | 60 OK | 60 kali | 334,999,999 | 60 kali | 368,499,998.9 | 60 kali | 405,349,998.8 | 60 kali | 445,884,998.7 | 60 kali | 490,473,498.5 | 60 kali | 490,473,499 | Bio Adminitrasi Pembangunan | Provinsi Jambi |
| 4.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi | 100% | 100% | 38,218,000 | 100% | 42,039,800 | 100% | 46,243,780 | 100% | 50,868,158 | 100% | 55,954,974 | 100% | 55,954,974 | Bio Adminitrasi Pembangunan | Provinsi Jambi |
| 4.01.01.1.08.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat yang di distribusikan | 500 surat | 550 surat | 8,238,000 | 600 surat | 9,061,800.0 | 750 surat | 9,967,980.0 | 800 surat | 10,964,778.0 | 850 surat | 12,061,255.8 | 850 surat | 12,061,256 | Bio Adminitrasi Pembangunan | Provinsi Jambi |
| 4.01.01.1.08.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara | 100% | 30 unit | 29,980,000 | 30 unit | 32,978,000.0 | 30 unit | 36,275,800.0 | 30 unit | 39,903,380.0 | 30 unit | 43,893,718.0 | 30 unit | 43,893,718 | Bio Adminitrasi Pembangunan | Provinsi Jambi |
| 4.01.08 | Program Kebijakan Administrasi Pembangunan | Persentase capaian kinerja pembangunan | NA | 72.5% | 1,505,878,450 | 74.0% | 1,656,466,295 | 77.5% | 1,822,112,925 | 79.0% | 2,004,324,217 | 81.5% | 2,204,756,639 | 81.5% | 2,204,756,639 | Bio Adminitrasi Pembangunan | Provinsi Jambi |
| 4.01.08.1.01 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Persentase capaian kinerja pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah | NA | 65% | 938,000,000 | 66% | 1,031,800,000 | 72% | 1,134,980,000 | 73% | 1,248,478,000 | 76% | 1,373,325,800 | 76% | 1,373,325,800 | Bio Adminitrasi Pembangunan | Provinsi Jambi |
| 4.01.08.1.01.01 | Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD | Jumlah laporan /rekomendasi/ bahan rumusan kebijakan standar pengendalian pelaksanaan pembangunan sumber dana APBD yang akan ditindak lanjuti , dan kajian permasalahan dalam rangka pengendalian tertib administrasi pelaksanaan pembangunan sumber dana APBD | NA | 4 laporan | 250,000,000 | 4 laporan | 275,000,000 | 4 laporan | 302,500,000 | 4 laporan | 332,750,000 | 4 laporan | 366,025,000 | 4 laporan | 366,025,000 | Bio Adminitrasi Pembangunan | Provinsi Jambi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|----|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|-------------|-----------------------------|----------------|
| 4.01.08.1.01.02 | Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN | Jumlah laporan /rekomendasi/ bahan rumusan kebijakan standar pengendalian pelaksanaan pembangunan sumber dana APBN yang akan ditindak lanjuti , dan kajian permasalahan dalam rangka pengendalian tertib administrasi pelaksanaan pembangunan sumber dana APBN. | NA | 4 laporan | 160,000,000 | 4 laporan | 176,000,000.0 | 4 laporan | 193,600,000.0 | 4 laporan | 212,960,000.0 | 4 laporan | 234,256,000.0 | 4 laporan | 234,256,000 | Bio Adminitrasi Pembangunan | Provinsi Jambi |
| 4.01.08.1.01.03 | Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Wilayah | Jumlah laporan /rekomendasi/ bahan rumusan kebijakan standar Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah yang akan ditindak lanjuti . | NA | 4 laporan | 528,000,000 | 4 laporan | 580,800,000 | 4 laporan | 638,880,000 | 4 laporan | 702,768,000 | 4 laporan | 773,044,800 | 4 laporan | 773,044,800 | Bio Adminitrasi Pembangunan | Provinsi Jambi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|----|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------------|----------------|
| 4.01.08.1.02 | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Persentase capaian serapan anggaran (realisasi keuangan dan fisik) | NA | 80% | 567,878,450 | 82% | 624,666,295 | 83% | 687,132,925 | 85% | 755,846,217 | 87% | 831,430,839 | 87% | 831,430,839 | Bio Adminitrasi Pembangunan | Provinsi Jambi |
| 4.01.08.1.02.01 | Analisis capaian kinerja pembangunan daerah | Jumlah laporan analisis capaian kinerja pembangunan daerah | NA | 4 laporan | 200,000,000 | 4 laporan | 220,000,000 | 4 laporan | 242,000,000 | 4 laporan | 266,200,000 | 4 laporan | 292,820,000 | 4 laporan | 292,820,000 | Bio Adminitrasi Pembangunan | Provinsi Jambi |
| 4.01.08.1.02.02 | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah | NA | 4 laporan | 189,878,600 | 4 laporan | 208,866,460 | 4 laporan | 229,753,106.0 | 4 laporan | 252,728,416.6 | 4 laporan | 278,001,258.3 | 4 laporan | 278,001,258 | Bio Adminitrasi Pembangunan | Provinsi Jambi |
| 4.01.08.1.02.03 | Fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah | Jumlah rumusan / rekomendasi kebijakan teknis pembangunan daerah | NA | 12 rumusan kebijakan | 177,999,850 | 12 rumusan kebijakan | 195,799,835 | 12 rumusan kebijakan | 215,379,818.5 | 12 rumusan kebijakan | 236,917,800.4 | 12 rumusan kebijakan | 260,609,580.4 | 12 rumusan kebijakan | 260,609,580 | Bio Adminitrasi Pembangunan | Provinsi Jambi |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

7. BIRO ORGANISASI

| Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|---|-----------------------------------|--|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--|---------------|--|
| | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| [2] | [3] | | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] |
| UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | Indeks Kepuasan Masyarakat Biro | 87,90 | 88,60 | 655,000,000 | 88,70 | 751,000,000 | 88,80 | 945,000,000 | 88,85 | 1,135,000,000 | 88,90 | 1,425,000,000 | 88,90 | 1,425,000,000 | |
| Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Predikat Akuntabilitas Kinerja | B | BB | 160,000,000 | BB | 181,000,000 | BB | 205,000,000 | BB | 230,000,000 | BB | 260,000,000 | BB | 260,000,000 | |
| 1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Renstra/Renja tersusun | 4 Dok | 4 Dok | 100,000,000 | 4 Dok | 110,000,000 | 4 Dok | 120,000,000 | 4 Dok | 130,000,000 | 4 Dok | 140,000,000 | 4 Dok | 140,000,000 | |
| | Jumlah Rapat Perencanaan Biro | 2 kali | 2 kali | - | 2 kali | - | 2 kali | - | 2 kali | - | 2 kali | - | 10 kali | - | |
| | Jumlah Studi Tiru/Koordinasi dalam rangka Penguatan SAKIP dengan Sinergitas Perencanaan Biro dengan bagian Organisasi Pemerintah Kab/Kota | 11 Kab/Kota | 11 Kab/Kota | - | 11 Kab/Kota | - | 11 Kab/Kota | - | 11 Kab/Kota | - | 11 Kab/Kota | - | 11 Kab/Kota | - | |
| 2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA Murni Biro tersusun | 1 Dok | 1 Dok | 10,000,000 | 1 Dok | 12,000,000 | 1 Dok | 15,000,000 | 1 Dok | 20,000,000 | 1 Dok | 25,000,000 | 1 Dok | 25,000,000 | |
| | Jumlah Dokumen RKA Perubahan Biro tersusun | 1 Dok | 1 Dok | - | 1 Dok | - | 1 Dok | - | 1 Dok | - | 1 Dok | - | 1 Dok | - | |
| | Jumlah Rapat Penyusunan RKA Murni dan Perubahan Biro | 3 kali | 3 kali | - | 3 kali | - | 3 kali | - | 3 kali | - | 3 kali | - | 3 kali | - | |
| 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA Murni tersusun | 1 Dok | 1 Dok | 15,000,000 | 1 Dok | 20,000,000 | 1 Dok | 25,000,000 | 1 Dok | 30,000,000 | 1 Dok | 35,000,000 | 1 Dok | 35,000,000 | |
| | Jumlah dokumen DPA Perubahan Biro | 1 Dok | 1 Dok | - | 1 Dok | - | 1 Dok | - | 1 Dok | - | 1 Dok | - | 1 Dok | - | |
| | Jumlah Rapat Penyusunan DPA Murni dan Perubahan Biro | 4 kali | 4 kali | - | 4 kali | - | 4 kali | - | 4 kali | - | 4 kali | - | 4 kali | - | |
| 4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen LKPJ/LKJ tersusun | 2 Dok | 2 Dok | 25,000,000 | 2 Dok | 27,000,000 | 2 Dok | 30,000,000 | 2 Dok | 30,000,000 | 2 Dok | 35,000,000 | 2 Dok | 35,000,000 | |
| 5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Frekuensi rapat internal evaluasi kinerja Biro | 4 kali | 4 kali | 10,000,000 | 4 kali | 12,000,000 | 6 kali | 15,000,000 | 8 kali | 20,000,000 | 10 kali | 25,000,000 | 10 kali | 25,000,000 | |
| Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pelayanan Administrasi dan Operasional Biro | 100% | 100% | 430,000,000 | 100% | 500,000,000 | 100% | 665,000,000 | 100% | 825,000,000 | 100% | 1,080,000,000 | 100% | 1,080,000,000 | |
| 1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan | 54 Jenis | 60 Jenis | 130,000,000 | 65 Jenis | 140,000,000 | 75 Jenis | 170,000,000 | 85 Jenis | 200,000,000 | 95 Jenis | 250,000,000 | 434 Jenis | 250,000,000 | |
| 2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang disediakan | 21 Jenis | 35 Jenis | 40,000,000 | 40 Jenis | 45,000,000 | 55 Jenis | 60,000,000 | 65 Jenis | 75,000,000 | 70 Jenis | 80,000,000 | 286 Jenis | 80,000,000 | |
| 3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 2 Jenis | 2 Jenis | 60,000,000 | 2 Jenis | 65,000,000 | 2 Jenis | 85,000,000 | 2 Jenis | 100,000,000 | 2 Jenis | 150,000,000 | 2 Jenis | 150,000,000 | |
| 4 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi | 32 Kegiatan | 40 Kegiatan | 200,000,000 | 50 Kegiatan | 250,000,000 | 60 Kegiatan | 350,000,000 | 70 Kegiatan | 450,000,000 | 80 Kegiatan | 600,000,000 | 332 Kegiatan | 600,000,000 | |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Peralatan Kantor | 100% | 100% | 65,000,000 | 100% | 70,000,000 | 100% | 75,000,000 | 100% | 80,000,000 | 100% | 85,000,000 | 100% | 85,000,000 | |
| 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara | 95 Unit | 97 Unit | 65,000,000 | 99 Unit | 70,000,000 | 102 Unit | 75,000,000 | 104 Unit | 80,000,000 | 106 Unit | 85,000,000 | 603 Unit | 85,000,000 | |
| PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | Persentase Tingkat Ketercapaian Komponen Area Perubahan RB | 60,80% | 61,50% | 2,134,000,000 | 62,80% | 2,249,000,000 | 63,10% | 2,480,000,000 | 64,50% | 2,760,000,000 | 65% | 3,170,000,000 | 65% | 3,170,000,000 | |
| Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Tingkat Kematangan Kelembagaan PD Provinsi | 28,1 | 28,1 | 354,000,000 | 28,50 | 364,000,000 | 28,70 | 400,000,000 | 29 | 450,000,000 | 29,30 | 500,000,000 | 29,30 | 500,000,000 | |
| | Persentase Rekomendasi Penataan Kelembagaan Kab/Kota yang diterbitkan | 100% | 100% | 280,000,000 | 100% | 300,000,000 | 100% | 350,000,000 | 100% | 400,000,000 | 100% | 450,000,000 | 100% | 450,000,000 | |
| | Indeks Tingkat Efisiensi Unit dan Persentasi Unit Pemerintah Prov.Jambi | 1,2 | 1,3 | 250,000,000 | 1,4 | 260,000,000 | 1,5 | 270,000,000 | 1,6 | 280,000,000 | 1,7 | 350,000,000 | 1,7 | 350,000,000 | |
| 1 Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi | Jumlah buku gambaran kelembagaan PD Pemprov Jambi | 1 buku | 1 buku | 354,000,000 | 1 buku | 364,000,000 | 1 buku | 400,000,000 | 1 buku | 450,000,000 | 1 buku | 500,000,000 | 6 buku | 500,000,000 | |
| | Jumlah pelaksanaan rakor Penataan Kelembagaan PD Pemprov Jambi | 1 kali | 1 kali | - | 1 kali | - | 1 kali | - | 1 kali | - | 1 kali | - | 6 kali | - | |
| | Persentase Penataan Kelembagaan PD Pemprov Jambi | 100% | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | |
| | Jumlah Rakor Penataan UPTD Prov Jambi | 1 kali | 1 kali | - | 1 kali | - | 1 kali | - | 1 kali | - | 1 kali | - | 6 kali | - | |
| | Jumlah UPTD Pemprov Jambi yang terevaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | 8 UPTD | 8 UPTD | - | 8 UPTD | - | 9 UPTD | - | 10 UPTD | - | 11 UPTD | - | 54 UPTD | - | |
| | Jumlah Pelaksanaan Penilaian Mandiri Tingkat Kematangan Kelembagaan PD Prov Jambi | 1 kali | 1 kali | - | 1 kali | - | 1 kali | - | 1 kali | - | 1 kali | - | 6 kali | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|--|
| 2 | Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | Jumlah Kab/Kota yang dibina | 11 Kab/Kota | 11 Kab/Kota | 280,000,000 | 11 Kab/Kota | 300,000,000 | 11 Kab/Kota | 350,000,000 | 11 Kab/Kota | 400,000,000 | 11 Kab/Kota | 450,000,000 | 11 Kab/Kota | 450,000,000 | |
| | | Jumlah Pelaksanaan Rakor Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota | 1 kali | 2 kali | - | 2 kali | - | 2 kali | - | 2 kali | - | 2 kali | - | 11 kali | - | |
| | | Persentase Fasilitasi Raperbup/Raperwal/Perbup/Perwali yang dievaluasi | 100% | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | |
| | | Persentase Raperda yang dievaluasi | 100% | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | |
| Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan | Frekuensi pelaksanaan koordinasi dan konsultasi Anjab, ABK, Evjab dan SKJ | 3 kali | 4 | 250,000,000 | 5 | 260,000,000 | 6 | 270,000,000 | 6 | 280,000,000 | 6 | 350,000,000 | 30 Kali | 350,000,000 | | |
| | Frekuensi pelaksanaan movev penyusunan Anjab, ABK dan Evjab Pemerintah Kab/Kota | 11 Kab/Kota | 11 Kab/Kota | - | 11 Kab/Kota | - | 11 Kab/Kota | - | 11 Kab/Kota | - | 11 Kab/Kota | - | 11 Kab/Kota | - | | |
| | Indeks tingkat efisiensi dan prestasi unit Pemprov Jambi | 1,2 Indeks | 1,2 Indeks | - | 1,2 Indeks | - | 1,3 Indeks | - | 1,3 Indeks | - | 1,4 Indeks | - | 1,4 Indeks | - | | |
| | Jumlah dokumen Anjab dan ABK hasil Evaluasi Perangkat Daerah Pemprov Jambi | 13 Dok | 1 Dok | - | 1 Dok | - | 1 Dok | - | 1 Dok | - | 1 Dok | - | 18 Dok | - | | |
| | Jumlah dokumen Evjab hasil Evaluasi Perangkat Daerah Pemprov Jambi | 1 Dok | 1 Dok | - | 1 Dok | - | 1 Dok | - | 1 Dok | - | 1 Dok | - | 6 Dok | - | | |
| | Jumlah Dok penyusunan SKJ Pemprov Jambi | 1 Dok | 1 Dok | - | 1 Dok | - | 1 Dok | - | 1 Dok | - | 1 Dok | - | 6 Dok | - | | |
| | Jumlah Bimtek Anjab dan ABK Lingkup Pemprov Jambi | - | 1 kali | - | 1 kali | - | 1 kali | - | 1 kali | - | 1 kali | - | 5 Kali | - | | |
| | Jumlah Bimtek SKJ lingkup Pemprov Jambi | - | 1 kali | - | 1 kali | - | 1 kali | - | 1 kali | - | 1 kali | - | 5 Kali | - | | |
| Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | Persentase Pemerintah Kab/Kota dengan Predikat Reformasi Birokrasi "B" | 9% | 18 | 250,000,000 | 27 | 270,000,000 | 36 | 290,000,000 | 45 | 310,000,000 | 54 | 350,000,000 | 54 | 350,000,000 | Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi | |
| | Persentase PD Pemprov dengan Predikat Akuntabilitas ≥B | 23% | 23,25 | 350,000,000 | 27,90 | 360,000,000 | 32,55 | 370,000,000 | 37,20 | 380,000,000 | 41,86 | 450,000,000 | 41,86 | 450,000,000 | | |
| | Persentase Pemerintah Kab/Kota dengan Predikat Akuntabilitas ≥B | 18% | 81,81 | | 81,81 | | 90,90 | | 90,90 | | 100 | | 100 | | | |
| | Persentase PD yang menerapkan Budaya Kerja | 11% | 34 | 175,000,000 | 46 | 195,000,000 | 58 | 200,000,000 | 69 | 250,000,000 | 81 | 300,000,000 | 81 | 300,000,000 | | |
| | Persentase Pemerintah Kab/Kota yang memiliki kebijakan Budaya Kerja | 0 | 9% | | 18 | | 27 | | 36 | | 45 | | 45 | | | |
| | Persentase PD yang memiliki Peta Proses Bisnis | 9% | 23 | 175,000,000 | 44 | 190,000,000 | 62 | 250,000,000 | 79 | 290,000,000 | 100 | 320,000,000 | 100 | 320,000,000 | | |
| | Persentase PD yang mengimplementasikan SOP | 0 | 23% | | 44 | | 62 | | 79 | | 100 | | 100 | | | |
| | | 0 | 18% | 300,000,000 | 20 | 310,000,000 | 25 | 350,000,000 | 30 | 400,000,000 | 32 | 450,000,000 | 32 | 450,000,000 | | |
| Persentase Pemerintah Kab/Kota dengan IKM kategori "B" | 0 | 18% | 27 | | 45 | | 54 | | 72 | | 72 | | | | | |
| 1 | Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Frekuensi pelaksanaan koordinasi/konsultasi/asistensi/studi RB Pemprov Jambi | 6 kali | 6 kali | 250,000,000 | 6 kali | 270,000,000 | 6 kali | 290,000,000 | 6 kali | 310,000,000 | 6 kali | 350,000,000 | 36 Kali | 350,000,000 | |
| | | Jumlah monitoring percepatan RB Pemprov Jambi | 2 kali | 2 kali | - | 2 kali | - | 3 Kali | - | 3 Kali | - | 4 Kali | - | 16 Kali | - | |
| | | Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam Rangka Penguatan RB | 11 Kab/Kota | 11 Kab/Kota | - | 11 Kab/Kota | - | 11 Kab/Kota | - | 11 Kab/Kota | - | 11 Kab/Kota | - | 11 Kab/Kota | - | |
| | | Persentase Kab/Kota yang mendapat predikat RB "B" | 18% | 27% | - | 27% | - | 36% | - | 36% | - | 45% | - | 45% | - | |
| 2 | Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | Frekuensi movev capaian kinerja Perangkat Daerah per-triulan | 4 kali | 4 kali | 350,000,000 | 4 kali | 360,000,000 | 4 kali | 370,000,000 | 4 kali | 380,000,000 | 4 kali | 450,000,000 | 24 Kali | 450,000,000 | |
| | | Frekuensi pelaksanaan koordinasi/konsultasi/asistensi/studi penguatan SAKIP Pemprov Jambi | 6 kali | 6 kali | - | 6 kali | - | 6 kali | - | 6 kali | - | 6 kali | - | 36 Kali | - | |
| | | Jumlah fasilitasi pelaksanaan evaluasi SAKIP Pemprov Jambi dan Kab/Kota oleh Kementerian PAN dan RB | 1 kali | 1 kali | - | 1 kali | - | 1 kali | - | 1 kali | - | 1 kali | - | 6 Kali | - | |
| | | Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam penguatan SAKIP | 11 Kab/Kota | 11 Kab/Kota | - | 11 Kab/Kota | - | 11 Kab/Kota | - | 11 Kab/Kota | - | 11 Kab/Kota | - | 11 Kab/Kota | - | |
| | | Jumlah laporan kinerja Pemprov Jambi | 1 lap | 1 lap | - | 1 lap | - | 1 lap | - | 1 lap | - | 1 lap | - | 6 lap | - | |
| | | Jumlah pelaksanaan coaching penguatan SAKIP Pemerintah Kab/Kota | 1 kali | 1 kali | - | 1 kali | - | 1 kali | - | 1 kali | - | 1 kali | - | 6 Kali | - | |
| | | Pendampingan Penyusunan IKU dan PK Perangkat Daerah | 43 OPD | 0 | - | - | - | 43 OPD | - | - | - | 43 OPD | - | 43 OPD | - | |
| | | Jumlah pelaksanaan coaching penguatan SAKIP Perangkat Daerah Pemprov Jambi | 1 kali | 1 kali | - | 1 kali | - | 1 kali | - | 1 kali | - | 1 kali | - | 6 Kali | - | |
| | | Nilai AKIP Pemprov Jambi | 62 Nilai | 64 Nilai | - | 65 Nilai | - | 67 Nilai | - | 69 Nilai | - | 70,01 Nilai | - | 70,01 Nilai | - | |
| | | Persentase Kab/Kota dengan predikat AKIP "BB" | 9% | 9% | - | 18% | - | 18% | - | 18% | - | 27% | - | 27% | - | |
| | | Persentase Perangkat Daerah Pemprov Jambi dengan predikat AKIP "BB" | 19% | 21% | - | 23% | - | 26% | - | 28% | - | 30% | - | 30% | - | |
| | | Reviu Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daera Provinsi Jambi | - | 43 OPD | - | 43 OPD | - | 43 OPD | - | 43 OPD | - | 43 OPD | - | 43 OPD | - | |
| | | Reviu Laporan Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi | - | 43 OPD | - | 43 OPD | - | 43 OPD | - | 43 OPD | - | 43 OPD | - | 43 OPD | - | |
| | | Jumlah Pelaksanaan Rapat Kerja Tim Penguatan SAKIP Provinsi Jambi | - | 2 Kali | - | 2 Kali | - | 2 Kali | - | 2 Kali | - | 2 Kali | - | 2 Kali | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 3 | Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja | Monitoring dan Evaluasi penyusunan nilai dan perilaku budaya kerja lingkup Pemprov. Jambi | 43 PD | 43 PD | 175,000,000 | 43 PD | 195,000,000 | 43 PD | 200,000,000 | 43 PD | 250,000,000 | 43 PD | 300,000,000 | 43 PD | 300,000,000 |
| | | Persentase perangkat daerah Provinsi Jambi yang menerapkan budaya kerja | 11% | 34% | - | 44% | - | 60% | - | 79% | - | 100% | - | 100% | - |
| | | Pelaksanaan FGD Budaya Kerja | 1 kali | 1 kali | - | 1 kali | - | 1 kali | - | 1 kali | - | 1 kali | - | 6 kali | - |
| | | Monitoring dan Evaluasi pembentukan agen perubahan budaya kerja lingkup Pemerintah Prov. Jambi | 0 | 43 PD | - | 43 PD | - | 43 PD | - | 43 PD | - | 43 PD | - | 43 PD | - |
| | | Sosialisasi Pembentukan Agen Perubahan Budaya Kerja Pemerintahan Kab/Kota | - | 1 Kali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 Kali | - |
| | | Sosialisasi Penyusunan Nilai dan Perilaku Budaya Kerja | - | 1 Kali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 Kali | - |
| | | Frekwensi Monitoring dan Evaluasi Agen Perubahan dan Penyusunan Nilai dan Perilaku Budaya Kerja Pemerintahan Kab/Kota | - | 11 Kab/Kota | - | 11 Kab/Kota | - | 11 Kab/Kota | - | 11 Kab/Kota | - | 11 Kab/Kota | - | 11 Kab/Kota | - |
| | | Sosialisasi Nilai-nilai Dasar dan Employer Branding ASN Lingkup Pemerintah Kab/Kota Prov.Jambi | - | 11 Kab/Kota | - | 11 Kab/Kota | - | 11 Kab/Kota | - | 11 Kab/Kota | - | 11 Kab/Kota | - | 11 Kab/Kota | - |
| | | Sosialisasi Nilai-nilai Dasar dan Employer Branding ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi | - | 43 Kali | - | 43 Kali | - | 43 Kali | - | 43 Kali | - | 43 Kali | - | 43 Kali | - |
| 4 | Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan | Jumlah PD yang Mengimplementasikan Tatanaskah dan Pedoman Pakaian Dinas | - | 100% | 175,000,000 | 100% | 190,000,000 | 100% | 250,000,000 | 100% | 290,000,000 | 100% | 320,000,000 | 100% | 320,000,000 |
| | | Jumlah Perangkat Daerah yang Memiliki SOP | - | 8 PD | - | 8 PD | - | 8 PD | - | 9 PD | - | 10 PD | - | 53 PD | - |
| | | Penyusunan Standar Sarana dan Prasarana Kerja PD Pemprov Jambi | - | 1 Dok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 Dok | - |
| | | Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki Peta Proses Bisnis | - | 43 PD | - | 43 PD | - | 43 PD | - | 43 PD | - | 43 PD | - | 43 PD | - |
| | | Jumlah Peta Proses Bisnis Jambi Mantab 2021-2026 | - | 1 Dok | - | 1 Dok | | 1 Dok | | 1 Dok | | 1 Dok | | 1 Dok | |
| 5 | Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | Frekuensi monev capaian kinerja peningkatan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah | 4 kali | 5 Kali | 300,000,000 | 6 Kali | 310,000,000 | 7 Kali | 350,000,000 | 8 Kali | 400,000,000 | 9 Kali | 450,000,000 | 39 Kali | 450,000,000 |
| | | Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik | 11 Kab/Kota | 11 Kab/Kota | - | 11 Kab/Kota | - | 11 Kab/Kota | - | 11 Kab/Kota | - | 11 Kab/Kota | - | 11 Kab/Kota | - |
| | | Nilai IKM Provinsi Jambi | 83 Nilai | 83,40 Nilai | - | 83,60 Nilai | - | 83,80 Nilai | - | 84 Nilai | - | 84,10 Nilai | - | 84,10 Nilai | - |
| | | Jumlah pelaksanaan sosialisasi inovasi pelayanan publik | 1 kali | 1 kali | - | 1 kali | - | 1 kali | - | 1 kali | - | 1 kali | - | 6 Kali | - |
| | | Jumlah pelaksanaan survei kepuasan masyarakat | 1 kali | 1 kali | - | 1 kali | - | 1 kali | - | 1 kali | - | 1 kali | - | 6 Kali | - |
| | | Jumlah pembinaan peningkatan kualitas pelayanan publik Perangkat daerah | 43 kali | 43 kali | - | 43 kali | - | 43 kali | - | 43 kali | - | 43 kali | - | 43 kali | - |
| | | Jumlah proposal inovasi pelayanan publik | 15 lap | 5 lap | - | 6 lap | - | 7 lap | - | 8 lap | - | 10 lap | - | 51 lap | - |
| | | Jumlah Rakor teknis pemenuhan komponen standar pelayanan publik SOP Perangkat daerah | 1 kali | 1 Kali | - | 1 Kali | - | 1 Kali | - | 1 Kali | - | 1 Kali | - | 6 Kali | - |
| | | | | | 2,789,000,000 | | 3,000,000,000 | | 3,425,000,000 | | 3,895,000,000 | | 4,595,000,000 | | |

8. BIRO UMUM

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Serta Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir Renstra |
|---|--|---|---|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------------------------------|
| | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | |
| | | | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas kinerja, keuangan dan Aset Setda Provinsi Jmbi | 89% | 89.2 | 103,877,735,968 | 89.4 | 110,843,156,786 | 89.6 | 116,098,784,031 | 89.8 | 121,680,696,039 | 90 | 124,973,602,726 | 90 | 132,254,343,899 | 90 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi | 90% | 91 | 10,651,600 | 92 | 175,000,000 | 93 | 192,500,000 | 94 | 211,750,000 | 95 | 232,925,000 | 95 | 256,217,500 | 95 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat yang dibuat | 40 | 8 | 9,150,000 | 8 | 175,000,000 | 8 | 192,500,000 | 8 | 211,750,000 | 8 | 232,925,000 | 8 | 256,217,500 | 40 |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 50 | 10 | 1,501,600 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Opini atas laporan keuangan Sekretariat | Sesuai SAP | Sesuai | 54,847,963,563 | Sesuai | 57,657,515,241 | Sesuai | 60,540,391,003 | Sesuai | 63,567,410,553 | Sesuai | 66,594,430,104 | Sesuai | 71,831,173,925 | Sesuai SAP |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang di bayar gaji dan tunjangannya | 78 Orang | 475 | 54,270,652,363 | 475 | 56,984,184,981 | 475 | 59,833,394,230 | 475 | 62,825,063,942 | 475 | 65,816,733,653 | 475 | 70,992,322,254 | 475 Orang |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Verifikasi Keuangan SKPD | 40 | 8 | 491,336,200 | 8 | 515,903,010 | 8 | 541,698,161 | 8 | 568,783,069 | 8 | 595,867,977 | 8 | 642,724,867 | 40 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 50 | 10 | 32,530,000 | 10 | 58,554,000 | 10 | 61,481,700 | 10 | 64,555,785 | 10 | 67,629,870 | 10 | 72,948,037 | 50 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 50 | 10 | 53,445,000 | 10 | 98,873,250 | 10 | 103,816,913 | 10 | 109,007,758 | 10 | 114,198,604 | 10 | 123,178,767 | 50 |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Biro Umum | B | B | 1,376,539,501 | B | 1,612,426,445 | B | 1,660,791,557 | B | 1,736,568,687 | B | 1,786,196,515 | B | 1,841,605,046 | B |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Persentase Pengamanan Milik Daerah yang di fasilitasi | 0 | 25% | 66,378,000 | 30% | 1,128,775,326 | 40% | 1,128,775,326 | 50% | 1,151,350,833 | 60% | 1,174,377,849 | 60% | 1,197,865,406 | 60% |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 0 | 10 | 235,137,381.00 | 10 | 258,651,119 | 10 | 284,516,231 | 10 | 312,967,854 | 10 | 327,193,666 | 10 | 344,264,640 | 50 |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Dokumen BMD | 0 | 10 | 1,075,024,120 | 10 | 225,000,000 | 10 | 247,500,000 | 10 | 272,250,000 | 10 | 284,625,000 | 10 | 299,475,000 | 50 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Biro Umum | B | B | 7,872,286,562 | B | 8,669,783,928 | B | 9,000,061,283 | B | 9,357,583,289 | B | 9,545,970,960 | B | 9,783,313,258 | B |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di fasiltiasi | 80% | 82 | 770,576,880 | 84 | 809,105,724 | 86 | 849,561,010 | 88 | 934,517,111 | 90 | 976,995,162 | 95 | 1,027,968,822 | 90% |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di fasilitasi | 80% | 82 | 4,950,839,542 | 84 | 5,000,347,937 | 86 | 5,050,351,417 | 88 | 5,100,854,931 | 90 | 5,100,854,931 | 95 | 5,151,863,480 | 90% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Persentase Peralatan Rumah Tangga yang di fasilitasi | 80% | 82 | 108,928,421 | 84 | 119,821,263 | 86 | 131,803,389 | 88 | 144,983,728 | 90 | 151,573,898 | 95 | 159,482,101 | 90% |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase Bahan Logistik Kantor yang di fasilitasi | 80% | 82 | 880,274,993 | 84 | 924,288,743 | 86 | 970,503,180 | 88 | 1,019,028,339 | 90 | 1,019,028,339 | 95 | 1,069,979,756 | 90% |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase Barang Cetakan dan Penggandaan yang di fasilitasi | 80% | 82 | 651,691,501 | 84 | 716,860,651 | 86 | 788,546,716 | 88 | 827,974,052 | 90 | 906,828,724 | 95 | 910,771,457 | 90% |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 750 Kali | 750 | 2,198,719,220 | 775 | 1,099,359,610 | 800 | 1,209,295,571 | 850 | 1,330,225,128 | 900 | 1,390,689,907 | 910 | 1,463,247,641 | 3335 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Biro Umum | B | B | 140,432,234 | B | 154,475,457 | B | 169,923,003 | B | 186,915,303 | B | 190,313,764 | B | 205,606,834 | B |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Persentase Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang di fasilitasi | 0 | 20 | 140,432,234 | 40 | 154,475,457 | 60 | 169,923,003 | 80 | 186,915,303 | 90 | 190,313,764 | 100 | 205,606,834 | 100% |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 0 | 100 | 6,855,062,740 | 100 | 6,923,613,367 | 100 | 6,992,849,501 | 100 | 7,062,777,996 | 100 | 7,062,777,996 | 100 | 7,133,405,776 | 100% |
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di beli | 0 | 4 | 6,855,062,740 | 4 | 6,923,613,367 | 4 | 6,992,849,501 | 4 | 7,062,777,996 | 4 | 7,062,777,996 | 4 | 7,133,405,776 | 20 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Biro Umum | B | B | 10,689,214,898 | B | 11,393,458,040 | B | 12,153,850,017 | B | 12,975,051,086 | B | 13,131,595,745 | B | 13,862,455,000 | B |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Surat masuk/keluar pertahun | 24000 Surat Masuk/Keluar | 24,500 | 91,180,735 | 25,000 | 100,000,000 | 25,500 | 110,000,000 | 26,000 | 121,000,000 | 26,500 | 124,300,000 | 26,500 | 133,100,000 | 127.500 Surat Masuk/Keluar |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang difasilitasi | 100% | 100% | 4,221,615,948 | 100% | 4,643,777,543 | 100% | 5,108,155,297 | 100% | 5,618,970,827 | 100% | 5,772,215,486 | 100% | 6,180,867,910 | 100% |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang difasilitasi | 100% | 100% | 1,518,620,965 | 100% | 1,548,993,384 | 100% | 1,579,973,252 | 100% | 1,611,572,717 | 100% | 1,611,572,717 | 100% | 1,643,804,171 | 100% |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase Pelayanan Umum Kantor yang difasilitasi | 100% | 100% | 4,857,797,250 | 100% | 5,100,687,113 | 100% | 5,355,721,468 | 100% | 5,623,507,542 | 100% | 5,623,507,542 | 100% | 5,904,682,919 | 100% |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di fasilitasi | 100% | 100% | 10,026,247,656 | 100% | 10,440,821,528 | 100% | 10,881,551,747 | 100% | 11,350,429,911 | 100% | 11,378,810,879 | 100% | 11,678,546,042 | 100% |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 100% | 100% | 3,694,437,800 | 100% | 3,879,159,690 | 100% | 4,073,117,675 | 100% | 4,276,773,558 | 100% | 4,276,773,558 | 100% | 4,319,541,294 | 100% |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 100% | 100% | 1,015,827,964 | 100% | 1,066,619,362 | 100% | 1,119,950,330 | 100% | 1,175,947,847 | 100% | 1,153,548,840 | 100% | 1,234,745,239 | 100% |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang difasilitasi | 75% | 80% | 173,010,000 | 82% | 190,311,000 | 84% | 209,342,100 | 86% | 230,276,310 | 90% | 236,556,573 | 93% | 253,303,941 | 95% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|-------------|
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan yang difasilitasi | 75% | 80% | 1,225,887,390 | 82% | 1,348,476,129 | 84% | 1,483,323,742 | 86% | 1,631,656,116 | 90% | 1,676,155,828 | 93% | 1,794,821,728 | 95% |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan yang difasilitasi | 75% | 80% | 3,917,084,502 | 82% | 3,956,255,347 | 84% | 3,995,817,900 | 86% | 4,035,776,079 | 90% | 4,035,776,079 | 93% | 4,076,133,840 | 95% |
| Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi | 100% | 100% | 3,040,589,354 | 100% | 2,955,211,334 | 100% | 3,102,971,901 | 100% | 3,258,120,496 | 100% | 3,258,120,496 | 100% | 3,421,026,521 | 100% |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang di bayarkan | 100% | 100 | 2,824,624,894 | 100 | 2,955,211,334 | 100 | 3,102,971,901 | 100 | 3,258,120,496 | 100 | 3,258,120,496 | 100 | 3,421,026,521 | 100 |
| Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi | 100% | 100 | 363,589,600 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 |
| Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi | 100% | 100 | 10,343,668,043 | 100 | 10,860,851,445 | 100 | 11,403,894,017 | 100 | 11,974,088,718 | 100 | 11,792,461,269 | 100 | 12,240,993,999 | 100 |
| Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Yang di Fasilitas | 100% | 100 | 6,093,956,741 | 100 | 6,398,654,578 | 100 | 6,718,587,307 | 100 | 7,054,516,672 | 100 | 6,920,144,926 | 100 | 7,125,061,839 | 100 |
| Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Yang di Fasilitas | 100% | 100 | 2,143,115,802 | 100 | 2,250,271,592 | 100 | 2,362,785,172 | 100 | 2,480,924,430 | 100 | 2,433,668,727 | 100 | 2,555,352,163 | 100 |
| Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang difasilitasi | 100% | 100 | 2,106,595,500 | 100 | 2,211,925,275 | 100 | 2,322,521,539 | 100 | 2,438,647,616 | 100 | 2,438,647,616 | 100 | 2,560,579,996 | 100 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jambi
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program serta Kegiatan | Indikator kinerja Program (outcome)dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|------|---|--|--|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|----------------|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai SAKIP | 66.35 | 67 | 3,852,518,650 | 68 | 7,472,634,173 | 70 | 9,893,678,499 | 72 | 12,467,666,425 | 74 | 15,556,274,953 | 76 | 19,516,513,911 | Biro Administrasi Pimpinan | Provinsi Jambi |
| | | Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda | NA | 85% | | 86% | | 88% | | 89% | | 90% | | 92% | | | |
| | | IKM Fasilitasi Keprotokolan | NA | 85 | | 86 | | 88 | | 89 | | 90 | | 90 | | | |
| | | Persentase Pemenuhan Materi Acara/Rapat Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah | NA | 85% | | 86% | | 88% | | 89% | | 90% | | 92% | | | |
| I.I | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP | 66.35 | 67 | 181,966,500 | 68 | 665,569,000 | 70 | 865,239,700 | 72 | 1,124,811,610 | 74 | 1,462,255,093 | 76 | 1,900,931,621 | | |
| 1 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan | Mulai tahun 2022, semua sub kegiatan ini mencakup seluruh BIRO | 4 dokume n | 141,026,500 | 5 dokume n | 315,602,000 | 5 dokume n | 410,282,600 | 5 dokume n | 533,367,380 | 5 dokume n | 693,377,594 | 5 dokume n | 901,390,872 | | |
| | | Jumlah Pelaksanaan Sinkronisasi perencanaan program dan anggaran lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi | 0 | 22 kali | | 22 kali | | 22 kali | | 22 kali | | 22 kali | | 22 kali | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program serta Kegiatan | Indikator kinerja Program (outcome)dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|------|--|--|---|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|--------|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 |
| 2 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja, Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Evaluasi Kinerja | Mulai tahun 2022, semua sub kegiatan ini mencakup seluruh BIRO) | 3 Dokum en | 40,940,000 | 1 Dokum en | 349,967,000 | 1 Dokum en | 454,957,100 | 1 Dokum en | 591,444,230 | 1 Dokum en | 768,877,499 | 1 Dokum en | 999,540,749 | | |
| | | Jumlah Rapat Koordinasi perencanaan program dan anggaran lingkup Sekretariat Daerah | 0 | 4 kali | | 4 kali | | 4 kali | | 4 kali | | 4 kali | | 4 kali | | | |
| | | Jumlah Rapat Monitoring dan Evaluasi Perencanaan program dan anggaran lingkup Sekretariat Daerah | 0 | 4 kali | | 4 kali | | 4 kali | | 4 kali | | 4 kali | | 4 kali | | | |
| I.II | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian | 0 | 100% | 329,940,100 | 100% | 750,208,680 | 100% | 975,271,284 | 100% | 1,267,852,669 | 100% | 1,397,750,470 | 100% | 1,566,617,611 | | |
| 3 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah laporan Pendataan Administrasi Kepegawaian Lingkup Setda Provinsi Jambi | 0 | 9 dokume n | 197,083,600 | 9 dokume n | 256,208,680 | 9 dokume n | 333,071,284 | 9 dokume n | 432,992,669 | 9 dokume n | 562,890,470 | 9 dokume n | 731,757,611 | | |
| | | Jumlah pengolahan administrasi kepegawaian berbasis aplikasi/web | 0 | 1 paket | | 1 paket | | 1 paket | | 1 paket | | 1 paket | | 1 paket | | | |
| | | Jumlah data administrasi kepegawaian setda yang terhimpun secara digital | 0 | 1 paket | | 1 paket | | 1 paket | | 1 paket | | 1 paket | | 1 paket | | | |
| | | Jumlah Sosialisasi Peraturan Kepegawaian lingkup Setda Provinsi Jambi | 0 | 2 kali | | 2 kali | | 2 kali | | 2 kali | | 2 kali | | 2 kali | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program serta Kegiatan | Indikator kinerja Program (outcome)dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|-------|---|--|---|---|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|--------|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 |
| 4 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan dan pendidikan | 0 | 9 ORANG | 132,856,500 | 76 orang | 494,000,000 | 76 orang | 642,200,000 | 76 orang | 834,860,000 | 76 orang | 834,860,000 | 76 orang | 834,860,000 | | |
| | | Jumlah ASN/PTT/TA yang mengikuti Bimtek atau kursus profesi | 0 | | | 76 orang | | 76 orang | | 76 orang | | 76 orang | | | | | |
| I.III | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur | 0 | | | 100% | 683,778,000 | 100% | 888,911,400 | 100% | 1,155,584,820 | 100% | 1,502,260,266 | 100% | 1,952,938,346 | | |
| 5 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas harian lingkup Sekretariat Daerah untuk ASN dan PTT | 0 | | | 900 stel | 683,778,000 | 900 stel | 888,911,400 | 900 stel | 1,155,584,820 | 900 stel | 1,502,260,266 | 900 stel | 1,952,938,346 | | |
| I.IV | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi perkantoran yang terpenuhi | 0 | 100% | 637,136,726 | 100% | 998,321,882 | 100% | 1,297,818,447 | 100% | 1,380,564,780 | 100% | 1,528,944,414 | 100% | 1,721,837,938 | | |
| 6 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia | 0 | 57 jenis | 163,824,236 | 60 | 220,760,000 | 61 | 286,988,000 | 62 | 255,566,000 | 63 | 255,566,000 | 63 | 255,566,000 | | |
| 7 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | jumlah barang cetakan dan penggandaan | 0 | 8 jenis | 28,480,670 | 8 | 42,000,000 | 8 | 54,600,000 | 8 | 70,980,000 | 8 | 92,274,000 | 8 | 119,956,200 | | |
| 8 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 0 | 10 media | 121,565,232 | 10 media | 200,000,000 | 10 media | 260,000,000 | 10 media | 338,000,000 | 10 media | 439,400,000 | 10 media | 571,220,000 | | |
| 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan | 0 | 10 kali | 323,266,588 | 12 kali | 484,899,882 | 14 kali | 630,369,847 | 16 kali | 630,400,000 | 17 kali | 630,400,000 | 17 kali | 630,400,000 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program serta Kegiatan | Indikator kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|------|---|--|---|---|---------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--|--------|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 |
| I.V | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara | 0 | 48 unit | 32,450,000 | 48 unit | 50,662,000 | 48 unit | 65,860,600 | 48 unit | 85,618,780 | 48 unit | 111,304,414 | 48 unit | 144,695,738 | | |
| 10 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara | 0 | 48 unit | 32,450,000 | 48 unit | 50,662,000 | 48 unit | 65,860,600 | 48 unit | 85,618,780 | 48 unit | 111,304,414 | 48 unit | 144,695,738 | | |
| I.VI | Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan | Persentase Materi, Komunikasi dan Dokumentasi pimpinan yang terfasilitasi | 0 | 90% | 1,175,320,100 | 90% | 2,409,234,300 | 90% | 3,376,086,820 | 90% | 4,357,799,096 | 90% | 5,665,179,155 | 90% | 7,168,922,901 | | |
| 11 | Penyiapan Materi Pimpinan | Jumlah materi rapat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disiapkan | 0 | 240 dokume n | 202,045,900 | 240 dokume n | 502,045,900 | 240 dokume n | 502,045,900 | 240 dokume n | 502,045,900 | 240 dokume n | 652,700,000 | 240 dokume n | 652,700,000 | | |
| | | Persentase penyusunan dokumentasi dan pelaporan | 0 | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | | | | |
| 12 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah pidato Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disusun | 0 | 986 pidato/ sambut an | 246,720,000 | 986 pidato/ sambut an | 454,080,000 | 986 pidato/ambut an | 985,000,000 | 986 pidato/ambut an | 1,400,000,000 | 986 pidato/ambut an | 1,820,000,000 | 986 pidato/ambut an | 2,366,000,000 | | |
| | | Jumlah dokumen yang berisi masukan kepada Gubernur/Wagub terkait info tertentu | 0 | 12 dokume n | | 12 dokume n | | 12 dokume n | | 12 dokume n | | 12 dokume n | | | | | |
| | | Jumlah Publikasi Siaran Pers Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 0 | 12 dokume n | | 12 dokume n | | 12 dokume n | | 12 dokume n | | 12 dokume n | | | | | |
| 13 | Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan | Persentase Fasilitasi Layanan Dokumentasi terhadap Kepala Daerah | 0 | 90% | 726,554,200 | 90% | 1,453,108,400 | 90% | 1,889,040,920 | 90% | 2,455,753,196 | 90% | 3,192,479,155 | 90% | 4,150,222,901 | | |
| | | Jumlah notulensi Rapat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 0 | 60 dokume n | | 60 dokume n | | 60 dokume n | | 60 dokume n | | 60 dokume n | | | | | |
| | | Jumlah publikasi kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 0 | 365 kali | | 365 kali | | 365 kali | | 365 kali | | 365 kali | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program serta Kegiatan | Indikator kinerja Program (outcome)dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|-------|---|--|---|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|--------|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 |
| I.VII | Fasilitasi Keprotokolan | Persentase kegiatan keprotokolan yang difasilitasi | 100% | 100% | 1,495,705,224 | 100% | 1,914,860,311 | 100% | 2,424,490,249 | 100% | 3,095,434,670 | 100% | 3,888,581,142 | 100% | 5,060,569,756 | | |
| 14 | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara | Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara | 623 kali | 623 kali | 1,134,432,800 | 650 kali | 1,361,319,360 | 700 kali | 1,633,583,232 | 725 kali | 1,960,299,878 | 750 kali | 2,352,359,854 | 750 kali | 2,822,831,825 | | |
| 15 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 150 kali | 150 kali | 209,717,000 | 200 kali | 356,518,900 | 250 kali | 534,778,350 | 300 kali | 802,167,525 | 350 kali | 1,203,251,288 | 350 kali | 1,804,876,931 | | |
| 16 | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | Jumlah Koordinasi Hubungan Keprotokolan se-Provinsi Jambi | 0 | 1 kali | 151,555,424 | 2 kali | 197,022,051 | 3 kali | 256,128,667 | 4 kali | 332,967,267 | 4 kali | 332,970,000 | 4 kali | 432,861,000 | | |
| | | | | | 3,852,518,650 | | 7,472,634,173 | | 9,893,678,499 | | 12,467,666,425 | | 15,556,274,953 | | 19,516,513,911 | | |

BAB VII**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Rumusan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 sebagaimana terdapat dalam tabel 7.1

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

| Indikator | Satuan | Awal | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | |
|---|--------|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Jambi > 2,900 | Skor | 2,8491 | >2,500 | >2,600 | >2,700 | >2,800 | >2,850 | >2,900 |

2. Biro Kesejahteraan Rakyat

| Indikator | Satuan | Awal | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | |
|--|--------------------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Jumlah Rekomendasi Kesra yang ditetapkan | Jumlah Rekomendasi | 24 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |

3. Biro Hukum

| Indikator | Satuan | Awal | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | |
|--|---------------------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Jumlah produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi | Jumlah produk hukum | 3496 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Persentase penyelesaian kasus hukum dan HAM Provinsi Jambi | persen | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 |

4. Biro Perekonomian

| Indikator | Satuan | Awal | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | |
|--|--------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Persentase pengelola kebijakan dan koordinasi perekonomian, SDA, BUMD dan BLUD | persen | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 90 |

5. Biro Pengelolaan Barang dan Jasa

| Indikator | Satuan | Awal | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | |
|-----------|--------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |

6. Biro Administrasi Pembangunan

| Indikator | Satuan | Awal | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | |
|--|---------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Persentase capaian kinerja pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah | persen | NA | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| Persentase capaian kinerja pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah | persen | NA | 50 | 50 | 60 | 60 | 65 | 70 |
| Persentase capaian kinerja pembangunan daerah | persen | NA | 50 | 50 | 60 | 60 | 65 | 70 |
| Jumlah capaian rumusan kebijakan di bidang pembangunan | rumusan | NA | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

7. Biro Organisasi

| Indikator | Satuan | Awal | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | |
|---|--------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Persentase Tingkat Ketercapaian Komponen Area Perubahan Reformasi Birokrasi | persen | 60,8 | 61,5 | 62,8 | 63,1 | 64,5 | 65 | 65 |

8. Biro Umum

| Indikator | Satuan | Awal | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | |
|---|--------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Persentase Tingkat Ketercapaian Program Penunjang Biro Umum | persen | 89 | 89,2 | 89,4 | 89,6 | 89,8 | 90 | 90 |

9. Biro Administrasi Pimpinan

| Indikator | Satuan | Awal | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | |
|---|--------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nilai AKIP Setda | Skor | NA | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 68 |
| IKM Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda | IKM | NA | 80,03 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 |
| IKM Fasilitasi Keprotokolan | IKM | NA | 85 | 86 | 88 | 89 | 90 | 90 |
| Persentase Pemenuhan Materi Acara/Rapat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persen | NA | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah Dokumen perencanaan bidang/urusan Pemerintahan untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra ini disusun untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan penunjang dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Provinsi Jambi yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga untuk tercapainya sasaran Pembangunan Nasional di Provinsi Jambi. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Sekretariat Daerah ini akan menjadi acuan dalam Penilaian Kinerja Sekretariat Daerah.

Karena itu, renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Sekretariat Daerah serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Provinsi Jambi.

Harus diperhatikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Sekretariat Daerah merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target penyelenggaraan bidang/urusan penunjang dan atau target kinerja sasaran Sekretariat Daerah.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Sekretariat Daerah yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Sekretariat Daerah harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LaKIP) Sekretariat Daerah. Laporan Kinerja

(LaKIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Sekretariat Daerah dimasa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan target kinerja Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.



VISI

**TERWUJUDNYA JAMBI MAJU, AMAN, NYAMAN,
TERTIB, AMANAH dan PROFESIONAL
DIBAWAH RIDHO ALLAH SWT.**

MISI

- MEMANTAPKAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN.**
- MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN
MASYARAKAT DAN DAERAH.**
- MEMANTAPKAN KUALITAS
SUMBER DAYA MANUSIA.**